

**ANALISA SENSUS PENDUDUK  
JAWA BARAT TAHUN 1990**



**Kerjasama :**

**PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I  
PROPINSI JAWA BARAT**

**Dengan**

**KANTOR STATISTIK PROPINSI JAWA BARAT  
1993.**

# **ANALISA SENSUS PENDUDUK JAWA BARAT TAHUN 1990**



**Kerjasama :**

**PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I  
PROPINSI JAWA BARAT  
Dengan  
KANTOR STATISTIK PROPINSI JAWA BARAT  
1993**

ORGANISASI PENULISAN ANALISA SENSUS PENDUDUK  
JAWA BARAT TAHUN 1990

---

PENANGGUNG JAWAB : Mohammad Asta SE  
PENANGGUNG JAWAB TEKNIS : Drs Lukman Ismail MA  
PENULIS : 1. Drs Lukman Ismail MA  
2. Drs Didin A Holidin MA  
ASISTEN PENULIS/PENGOLAHAN DATA : R.G. Oeloen Djajadilaga

ORGANISASI PENULISAN ANALISA SENSUS PENDUDUK  
JAWA BARAT TAHUN 1990

---

PENANGGUNG JAWAB : Mohammad Asta SE  
PENANGGUNG JAWAB TEKNIS : Drs Lukman Ismail MA  
PENULIS : 1. Drs Lukman Ismail MA  
2. Drs Didin A Holidin MA  
ASISTEN PENULIS/PENGOLAHAN DATA : R.G. Oeloen Djajadilaga

## KATA PENGANTAR

Sensus Penduduk saat ini masih merupakan sumber utama data kependudukan, baik secara nasional maupun regional, yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan, evaluasi, atau dasar pembuatan kebijaksanaan dibidang kependudukan. Sensus Penduduk Tahun 1990 merupakan sensus keempat yang dilaksanakan di Indonesia, di dalamnya memuat data kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat.

Agar data hasil sensus ini dapat lebih berguna lagi, analisa terhadap data tersebut sangat diperlukan. Dalam rangka inilah Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat telah melakukan analisa data hasil Sensus Penduduk Tahun 1990. Dengan adanya publikasi ini kami mengharapkan kebutuhan para pemakai data kependudukan dapat terpenuhi.

Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terlaksananya publikasi ini, kami ucapkan terima kasih.

Semoga bermanfaat.

KANTOR STATISTIK PROPINSI JAWA BARAT

K e p a l a ,



H. MOHAMAD ASTA, SE  
NIP 340001736

## KATA SAMBUTAN SEKWILDA TK.I JAWA BARAT

Dengan berakhirnya pelaksanaan Sensus Penduduk di Jawa Barat pada Tahun 1990 yang lalu, maka saat ini kita telah memiliki data Penduduk yang dapat diandalkan untuk berbagai kepentingan dalam menyusun kebijaksanaan dan pembangunan di Jawa Barat.

Sekalipun data penduduk hasil Sensus Tahun 1990 yang lalu telah kita miliki, kita belum dapat menggunakannya secara maksimal, oleh karena data nya masih bersifat global dan perlu dianalisa secara tajam agar dalam penggunaannya, tidak salah, maka dengan disusunnya Buku Analisa Data Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990 Jawa Barat akan sangat memudahkan bagi para pemakai data, khususnya bagi Pemerintah Daerah.

Atas dasar hal tersebut di atas maka untuk penyusunan Analisa Data Hasil Sensus Tahun 1990 tersebut telah dilakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat.

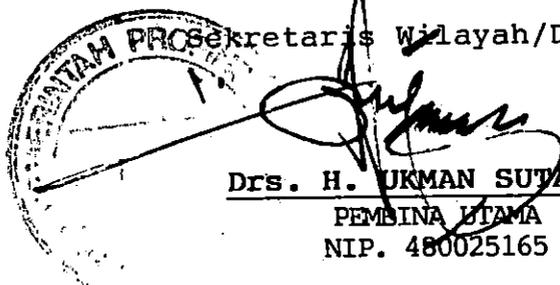
Dengan terbitnya Buku ini mudah - mudahan semua Instansi Pemerintah atau Badan Swasta akan terpenuhi kebutuhannya akan data/informasi kependudukan, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk dipublikasikan agar masyarakat luas dapat mengetahuinya.

Sebagai akhirul kata kami ucapkan semoga kerja sama kita untuk masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan, dan hasil karya kita semua dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh semua pihak.

Bandung, Juli 1993

a.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

PROSEKRETARIS Wilayah/Daerah,



**Drs. H. UKMAN SUTARYAN**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 480025165

## DAFTAR ISI

ORGANISASI PENULISAN	i	
KATA PENGANTAR	ii	
KATA SAMBUTAN	iii	
DAFTAR ISI	iv-v	
DAFTAR TABEL	vi-ix	
DAFTAR DIAGRAM	x	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Ruang Lingkup	2
	1.3 Sumber Data	2
	1.4 Gambaran Umum Daerah Jawa Barat	2
	1.4.1 Keadaan Ekonomi	6
	1.4.2 Keadaan Sosial Budaya	7
BAB II	TINGKAT PERTUMBUHAN, PERSEBARAN DAN KOMPOSISI PENDUDUK	12
	2.1 Pendahuluan	12
	2.2 Tingkat Pertumbuhan Penduduk	12
	2.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk	18
	2.4 Komposisi Penduduk	22
BAB III	KOMPONEN PERUBAHAN PENDUDUK	26
	3.1 Pendahuluan	26
	3.2 Fertilitas	26
	3.3 Mortalitas	33
	3.4 Migrasi	35
BAB IV	PENDIDIKAN	45
	4.1 Pendahuluan	45
	4.2 Angka Buta Huruf	46
	4.3 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	52
	4.4 Kemampuan Berbahasa Indonesia	56
	4.5 Partisipasi Sekolah	58

BAB V	KETENAGAKERJAAN	60
	5.1 Pendahuluan	60
	5.2 Komposisi Tenaga Kerja	61
	5.3 Penduduk Yang Bekerja	73
	5.4 Pengangguran	80
BAB VI	PERUMAHAN DAN LAHAN PERTANIAN	84
	6.1 Pendahuluan	84
	6.2 Luas Lantai	87
	6.3 Penggunaan Bahan Bakar	90
	6.4 Sumber Air Minum dan Pembuangan Air	94
	6.5 Pemilikan Barang Rumahtangga	98
BAB VII	KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKSANAAN	101
	7.1 Kesimpulan	101
	7.2 Saran Kebijakan	104
DAFTAR PUSTAKA		107 - 110
DAFTAR LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

Nomor	J U D U L	Halaman
1.4.1	Banyaknya Kecamatan dan Desa/Kelurahan Berikut Nama Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya Tahun 1991	4
1.4.2	Posisi Geografi dan Tinggi Gunung api di Jawa Barat	5
1.4.1.1	Perkembangan PDRB per Kapita Jawa Barat Tahun 1984-1989 (Harga Konstan 1983)	6
1.4.2.1	Jumlah Pemeluk Agama menurut Agama yang dianut di Jawa Barat	7
1.4.2.2	Persentase Jumlah Peribadatan menurut Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1990	9
1.4.2.3	Perkembangan Indeks Mutu Hidup menurut Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1980 dan 1990	10
2.2.1	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun per Kabupaten/Kotamadya periode 1971-1980 dan 1980-1990	17
2.4.1	Komposisi Umur dan Angka Beban Ketergantungan menurut Daerah, Tahun 1980 dan 1990	24
3.2.1	ASFR dan TFR, Tahun 1980 dan 1990	28
3.2.2	Rata-rata Umur Perkawinan Pertama menurut Daerah, Tahun 1971, 1980 dan 1990	30
3.2.3	Median Umur Perkawinan Pertama menurut Kelompok Umur dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990	31
3.2.4	Persentase Peserta KB Aktif menurut Jenis Kontrasepsi yang Digunakan, Tahun 1987 dan 1990	32

3.3.1	Perkiraan AKB dan AHH menurut Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1980 dan 1990	34
3.4.1	Penduduk menurut TempatLahir dan Tempat Tinggal Sekarang, Tahun 1971, 1980 dan 1990	37
3.4.2	Persentase Migrasi Masuk, Migrasi Keluar dan Migrasi Neto Semasa Hidup menurut Propinsi di Pulau Jawa, Tahun 1971, 1980 dan 1985	38
3.4.3	Persentase Migrasi Masuk, Migrasi Keluar dan Migrasi Neto menurut Tempat Tinggal Lima Tahun yang lalu di Pulau Jawa, Tahun 1980 dan 1985	39
3.4.4	Persentase Migran Berdasarkan Tempat Tinggal Terakhir Sebelumnya dan Alasan Pindah, Tahun 1985	41
3.4.5	Rasio Jenis Kelamin Migran Masuk menurut Jenis Migran per Wilayah Pembangunan Tahun 1984	41
3.4.6	Persentase Migran Masuk menurut Tingkat Pendidikan Tahun 1984	43
4.2.1	Persentase Tingkat Buta Huruf menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tahun 1980 dan 1990	47
4.2.2	Pesentase Tingkat Buta Huruf menurut Daerah dan Umur Tahun 1980 dan 1990	48
4.2.3	Persentase Tingkat Buta huruf menurut Kabupaten/Kotamadya Tahun 1971 1980 dan 1990	49
4.2.4	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Buta Huruf menurut Propinsi dan daerah, Tahun 1980 dan 1990	51
4.3.1	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990	54

4.3.2	Penduduk yang Berumur 10 Tahun ke atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Tahun 1990	55
4.4.1	Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun ke atas menurut Kabupaten/Kotamadya, Bahasa yang Dipakai sehari-hari dan Jenis Kelamin, Tahun 1990	57
5.2.1	Laju Pertumbuhan menurut Jenis Kelamin dan Daerah, Tahun 1971, 1980 dan 1990	63
5.2.2	Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kegiatan, Jenis Kelamin dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990	64
5.2.3	Persentase Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990	66
5.2.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Ketergantungan Ekonomi menurut Jenis Kelamin dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990	67
5.2.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Daerah, Tahun 1971, 1980 dan 1990	69
5.2.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin, Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990	72
5.3.1	Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Daerah, Tahun 1971, 1980 dan 1990	74
5.3.2	Persentase Penduduk yang Bekerja selama Seminggu yang lalu menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 1980 dan 1990	76

5.3.3	Persentase Penduduk yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 1980 dan 1990	78
5.3.4	Persentase Penduduk yang Bekerja selama Seminggu yang lalu menurut Jenis Pekerjaan Utama, Tahun 1980 dan 1990	79
5.4.1	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Jenis Kelamin dan daerah, Tahun 1980 dan 1990	81
5.4.2	Persentase Tingkat Pengangguran menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990	82
6.1.1	Jumlah Rumahtangga dan Laju Pertumbuhan Rumahtangga, Tahun 1971-1980 dan 1980-1990 menurut Kabupaten/Kotamadya	85
6.1.2	Hubungan antara Angka Kematian Bayi dan Fasilitas Rumahtangga, Tahun 1990	87
6.2.1	Persentase Rumahtangga menurut Kabupaten/Kotamadya dan Luas Lantai. Tahun 1990	89
6.3.1	Persentase Rumahtangga menurut Penggunaan Jenis Bahan Bakar untuk Penerangan per Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1980 dan 1990	91
6.3.2	Persentase Rumahtangga menurut Penggunaan Bahan Bakar untuk Memasak dan Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1980 dan 1990	93
6.4.1	Persentase Rumahtangga menurut Sumber Air Minum per Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1980 dan 1990	95
6.4.2	Persentase Rumahtangga menurut Tempat Buang Air Besar per Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1980 dan 1990	97
6.5.1	Persentase Rumahtangga menurut Barang Rumahtangga yang Dimiliki per Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1980 dan 1990	99

## DAFTAR DIAGRAM

Nomor	J U D U L	Halaman
2.2.1	Kuadran Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1971-1990	14
2.3.1	Kuadran Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1980 dan 1990	20

<https://jabar.bps.go.id>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kepedulian akan data atau informasi sebagai bahan dasar perencanaan, penyediaan data atau informasi tersebut menjadi bagian integral dari pembangunan itu sendiri. Salah satunya adalah data kependudukan. Data ini menjadi semakin penting karena peningkatan mutu sumber daya manusia dicakup dalam kebijaksanaan strategis Jawa Barat. Diharapkan bahwa sumber daya manusia dapat menjadi modal utama pembangunan. Diantara semua sumber daya yang dibutuhkan dalam pembangunan ini, maka sumber daya manusia memiliki arti yang paling penting.

Pengadaan data kependudukan yang komprehensif dan mengacu kepada berbagai aspek pembangunan hingga kini masih merupakan masalah. Di samping itu, kualitas datapun masih perlu ditingkatkan. Namun demikian, usaha ke arah perbaikan dan peningkatan kuantitas dan kualitas data tersebut dari hari ke hari semakin maju.

## 1.2 Ruang Lingkup

Analisa data hasil Sensus Penduduk tahun 1990 ini membahas data kependudukan baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/kotamadya. Untuk beberapa jenis data, analisis dilakukan hanya untuk tingkat propinsi. Beberapa data dari propinsi-propinsi lain disajikan untuk kepentingan perbandingan.

## 1.3 Sumber Data

Pada dasarnya data yang digunakan di dalam analisa ini bersumber dari hasil Sensus Penduduk tahun 1990. Namun demikian, untuk keperluan perbandingan dalam dimensi waktu dan ruang, maka beberapa data dari hasil Sensus Penduduk tahun 1971 dan 1980 juga disajikan.

## 1.4 Gambaran Umum Daerah Jawa Barat

Jawa Barat dengan luas wilayah sekitar 44 ribu Km<sup>2</sup> (32,80 persen dari luas wilayah Pulau Jawa atau 2,18 persen dari luas wilayah Indonesia) memiliki jumlah penduduk yang paling banyak. Propinsi ini terletak di ujung sebelah barat pulau Jawa; yaitu antara 5°50' - 7°50' Lintang Selatan dan 104°48' Bujur Timur.

ropinsi Jawa Barat berbatasan dengan Selat Sunda di sebelah barat, Laut Jawa dan DKI Jakarta di bagian utara, Propinsi Jawa Tengah di bagian timur, dan Samudera Indonesia di bagian selatan.

Secara administratif, pada tahun 1990, Jawa Barat memiliki 20 kabupaten dan empat kotamadya, dengan jumlah kecamatan sebanyak 469 buah. Diantara kabupaten, Kabupaten Bandung memiliki kecamatan yang paling banyak yaitu 38 buah dan Kabupaten Purwakarta merupakan kabupaten dengan jumlah kecamatan terkecil, yakni 10 buah. Diantara kotamadya, Kotamadya Bandung memiliki kecamatan terbanyak (26 buah); sementara Kotamadya Sukabumi merupakan kotamadya yang memiliki jumlah kecamatan terkecil (4 buah). Secara keseluruhan, Jawa Barat memiliki 7.101 buah desa dan kelurahan.

Tabel 1.4.1: Banyaknya Kecamatan dan Desa/Kelurahan  
Berikut Nama Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya  
Tahun 1991

Kabupaten/ Kotamadya	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Nama Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya
<b>KABUPATEN:</b>			
01. PANDEGLANG	16	335	Pandeglang
02. L E B A K	15	300	Rangkas Bitung
03. B O G O R	29	530	Cibinong
04. SUKABUMI	27	356	Sukabumi
05. CIANJUR	21	313	Cianjur
06. BANDUNG	38	448	Soreang
07. G A R U T	28	403	Garut Kota
08. TASIKMALAYA	29	412	Tasikmalaya
09. CIAMIS	25	358	Ciamis
10. KUNINGAN	17	569	Kuningan
11. CIREBON	21	424	Sumber
12. MAJALENGKA	17	327	Majalengka
13. SUMEDANG	17	269	Sumedang
14. INDRAMAYU	19	310	Indramayu
15. S U B A N G	18	250	Subang
16. PURWAKARTA	10	192	Purwakarta
17. KARAWANG	14	302	Karawang
18. BEKASI	20	237	Bekasi
19. TANGERANG	21	360	Tangerang
20. SERANG	27	412	Serang
<b>KOTAMADYA:</b>			
21. BOGOR	5	22	Bogor
22. SUKABUMI	4	15	Sukabumi
23. BANDUNG	26	135	Bandung
24. CIREBON	5	22	Cirebon
<b>JAWA BARAT</b>	<b>469</b>	<b>7101</b>	

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat (1991b)

Tabel 1.4.2 : Posisi Geografi dan Tinggi Gunung Api di Jawa Barat

Nama Gunung	Posisi Geografi (LS/BT) dari Jakarta	Tinggi Gunung (M)
01. Karang	6° 6' / 106° 02,5'	1778
02. Kiara Deres	6° 44' / 108° 39'	1432
03. Gagak	6° 44' / 106° 39'	1511
04. Perbakti	6° 45' / 106° 41'	1699
05. Salak	6° 43' / 106° 44'	2211
06. Gedeh	6° 47' / 106° 00'	2958
07. Patuha	7° 9' 37" / 107° 24'	2434
08. Wayang	7° 12,5' / 107° 38'	2181
09. Windu	6° 12,5' / 107° 38'	2137
10. Tangkuban Perahu	6° 46' / 107° 36'	2084
11. Papandayan	7° 19' / 107° 44'	2665
12. Kawah Manuk	7° 14' / 107° 43'	1950
13. Kawah Kamojang	7° 14' / 107° 17,5'	1640-1730
14. Guntur	7° 08' / 107° 20'	2249
15. Galunggung	7° 15' / 108° 03'	2168
16. Kawah Karaha	7° 15' / 108° 05'	1125-1155
17. Ciremai	7° 53,5' / 107° 24'	3078

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka Tahun 1990.

Kesuburan tanah Jawa Barat tidak diragukan lagi karena propinsi ini memiliki sumber-sumber alam yang dialiri sungai-sungai dan dibentengi gunung-gunung (Daroeman, 1972). Tidak kurang dari 514 buah sungai berikut anak-anak sungainya yang mengalir di Jawa Barat. Sungai-sungai ini dimanfaatkan, diantaranya, untuk pembangkit tenaga listrik. Sekitar 23 persen kebutuhan listrik nasional disediakan oleh Jawa Barat.

### 1.4.1 Keadaan Ekonomi

Pembangunan Jawa Barat lebih diarahkan pada pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, di mana pembangunan sektor industri yang ditunjang oleh sektor pertanian lebih diprioritaskan. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat per tahun dalam kurun waktu 1984-1989 berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional. Selengkapnya diperlihatkan dalam Tabel 1.4.1.1.

Tabel 1.4.1.1: Perkembangan PDRB Perkapita Jawa Barat, Tahun 1984-1989 (Harga Konstan 1983)

Tahun	PDRB Jawa Barat (%)	PDB Nasional (%)	PDRB Perkapita Jawa Barat (%)	PDB Perkapita Nasional (%)
1984	17,17	6,98	15,42	4,73
1985	6,12	2,46	7,78	0,31
1986	6,58	5,88	4,19	3,67
1987	3,73	4,93	1,43	2,77
1988	7,88	5,73	5,50	3,56
1989	7,82	7,39	5,45	5,18
Rata-rata	8,22	5,56	5,96	3,37

Sumber : Bappeda Tingkat I dan KSP Jawa Barat (1992a)

Tahun 1987 merupakan tahun yang kurang menguntungkan, di mana laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai titik terendah (3,73 persen), sedangkan pertumbuhan tertinggi dicapai dalam

tahun 1984, yaitu 17,17 persen. Demikian pula dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita berada di atas rata-rata nasional; yaitu 5,96 persen untuk Jawa Barat dan 3,37 persen untuk nasional.

#### 1.4.2 Keadaan Sosial Budaya

Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Jawa Barat, yaitu sebanyak 98,03 persen. Perhatikan Tabel 1.4.2.1.

Tabel 1.4.2.1: Jumlah Pemeluk Agama menurut Agama yang dianut di Jawa Barat.

Agama	1986		1987		1988		1989		1990	
		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)
Islam	28427098	98,20	29926122	97,87	29984255	97,88	30168440	98,12	32698318	98,03
Katolik	132762	0,46	203449	0,67	203499	0,66	114336	0,37	155933	0,47
Protestan	224182	0,77	255735	0,84	255735	0,84	339149	1,10	306376	0,92
Hindu	15722	0,06	34578	0,11	34578	0,11	21638	0,07	34706	0,10
Budha	134601	0,46	142053	0,46	142053	0,46	83678	0,27	132569	0,40
Lainnya	14576	0,05	14576	0,05	14576	0,05	21318	0,07	28910	0,08
<b>Jumlah</b>	<b>28948881</b>	<b>100,00</b>	<b>30576513</b>	<b>100,00</b>	<b>30634646</b>	<b>100,00</b>	<b>30748559</b>	<b>100,00</b>	<b>33356872</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat (1991a)

Namun demikian, kehidupan beragama antara masyarakat muslim dan non-muslim di Jawa Barat memperlihatkan tingkat kerukunan yang

tinggi. Mereka dapat hidup secara berdampingan dan memiliki toleransi beragama yang tinggi.

Sarana peribadatan di Jawa Barat dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Banyaknya sarana peribadatan pada tahun 1990 digambarkan dalam Tabel 1.4.2.2.

<https://jabar.bps.go.id>

Tabel 1.4.2.2: Persentase Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1990

Kabupaten/Kotamadya	Mesjid	Langgar	Mushola	Protestan	Gereja Katolik	Gereja Hindu	Pura Budha	Vihara Jumlah
01. Kab. Pandeglang	34,40	58,65	6,89	0,06	-	-	-	100,00
02. Kab. L e b a k	35,79	60,25	3,84	0,09	0,03	-	-	100,00
03. Kab. B o g o r	27,95	69,36	2,34	0,27	0,08	-	-	100,00
04. Kab. Sukabumi	30,67	66,52	2,70	0,07	0,01	-	0,03	100,00
05. Kab. Cianjur	24,70	70,62	4,42	0,21	0,01	-	0,04	100,00
06. Kab. Bandung	22,85	52,48	24,34	0,30	0,03	-	-	100,00
07. Kab. G a r u t	23,53	60,07	16,34	0,04	0,01	-	0,01	100,00
08. Kab. Tasikmalaya	32,23	49,69	17,86	0,16	0,06	-	0,02	100,00
09. Kab. Ciamis	30,85	65,01	3,80	0,29	0,05	-	0,01	100,00
10. Kab. Kuningan	12,32	67,80	19,58	0,13	0,17	-	-	100,00
11. Kab. Cirebon	13,30	79,58	6,04	0,37	0,18	-	0,53	100,00
12. Kab. Majalengka	13,83	70,02	15,66	0,42	0,07	-	-	100,00
13. Kab. Sumedang	31,13	50,88	17,83	0,16	-	-	-	100,00
14. Kab. Indramayu	14,16	81,79	3,27	0,67	0,11	-	-	100,00
15. Kab. S u b a n g	27,48	63,00	8,89	0,52	0,11	-	-	100,00
16. Kab. Purwakarta	22,91	70,72	5,78	0,37	0,15	-	0,07	100,00
17. Kab. Karawang	26,31	69,86	2,93	0,57	0,08	-	0,25	100,00
18. Kab. B e k a s i	26,47	67,46	4,67	1,03	0,03	-	0,34	100,00
19. Kab. Tangerang	21,21	72,77	5,24	0,46	-	-	0,32	100,00
20. Kab. S e r a n g	30,97	65,13	3,68	0,19	0,03	-	-	100,00
21. Kod. B o g o r	30,87	47,77	7,72	5,69	0,41	2,03	5,49	100,00
22. Kod. Sukabumi	30,75	41,18	21,12	6,68	0,27	-	-	100,00
23. Kod. Bandung	48,82	38,04	7,99	3,89	0,45	-	0,81	100,00
24. Kod. Cirebon	19,04	64,00	13,76	3,04	0,16	-	-	100,00
Jawa Barat	25,97	62,94	10,56	0,38	0,06	0,01	0,09	100,00

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat (1991b)

Dikaitkan dengan sumber daya manusia, secara fisik ini diukur dengan suatu indeks yang dikenal dengan sebutan Indeks

Mutu Hidup (IMH). Indeks ini dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup umur satu tahun, dan angka melek huruf.

Tabel 1.4.2.3: Perkembangan Indeks Mutu Hidup menurut Kabupaten/ Kotamadya dan daerah, Tahun 1980 dan 1990

Kabupaten/ Kotamadya	K o t a		Pedesaan		Kota+Pedesaan	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
01. Kab. Pandeglang	56,58	7,27	57,32	65,18	57,35	65,93
02. Kab. L e b a k	55,44	64,60	47,82	64,82	48,91	64,89
03. Kab. B o g o r	57,50	77,11	46,62	61,51	48,95	68,46
04. Kab. Sukabumi	61,39	71,20	55,14	67,32	55,27	67,66
05. Kab. Cianjur	58,37	70,35	56,77	66,77	56,77	67,28
06. Kab. Bandung	71,08	81,24	61,90	74,96	63,82	77,60
07. Kab. G a r u t	69,52	80,65	53,59	68,38	55,37	69,70
08. Kab. Tasikmalaya	60,82	75,66	62,84	68,41	62,39	69,56
09. Kab. C i a m i s	59,34	72,99	55,08	68,23	59,40	68,62
10. Kab. Kuningan	75,99	82,95	60,80	74,65	62,57	75,95
11. Kab. Cirebon	61,16	73,54	53,77	68,39	55,10	70,33
12. Kab. Majalengka	58,62	82,11	49,92	69,51	51,33	70,88
13. Kab. Sunedang	77,89	93,78	66,25	78,18	66,41	79,64
14. Kab. Indramayu	57,36	64,87	39,33	54,73	41,25	55,81
15. Kab. S u b a n g	68,37	83,24	49,33	67,69	50,05	69,22
16. Kab. Purwakarta	58,81	82,30	51,14	63,81	52,27	67,44
17. Kab. Karawang	67,48	70,95	39,42	55,83	43,33	58,89
18. Kab. B e k a s i	51,52	77,75	39,22	53,73	41,41	64,93
19. Kab. Tangerang	62,40	80,36	44,64	61,39	46,76	69,99
20. Kab. S e r a n g	73,61	77,76	46,16	54,47	50,26	58,25
21. Kod. B o g o r	56,03	88,51	-	-	56,23	88,51
22. Kod. Sukabumi	72,11	82,23	-	-	72,11	81,51
23. Kod. Bandung	75,10	84,08	-	-	75,10	84,08
24. Kod. Cirebon	67,29	81,41	-	-	67,29	68,81
Jawa Barat	66,31	78,47	52,63	65,01	54,43	68,58
Nasional*)	69,00	-	54,00	-	57,00	-

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat dan BAPPEDA Tk I Jawa Barat (1992)

\*) Biro Pusat Statistik (1990)

Seperti tersaji dalam Tabel 1.4.2.3, posisi IMH Jawa Barat masih berada di bawah nasional, yaitu 54,43 untuk Jawa Barat dan 57 untuk nasional. Hal ini mencerminkan perlunya keseimbangan antara pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan di bidang sosial.

## BAB II

### TINGKAT PERTUMBUHAN, PERSEBARAN DAN KOMPOSISI PENDUDUK

#### 2.1 Pendahuluan

Penduduk dalam proses perkembangannya mengalami seleksi yang pendorongnya terdiri atas kelahiran, kematian dan berbagai migrasi. Dengan berbagai perilaku komponen kependudukan di atas maka jumlah penduduk dari waktu ke waktu berubah-ubah. Perubahan ini tidak hanya di dalam jumlah melainkan juga di dalam persebaran dan komposisinya. Ketiga hal tersebut, tingkat pertumbuhan, persebaran dan komposisinya, seringkali menimbulkan perbenturan persoalan dengan aspek-aspek non-kependudukan lainnya.

Berkaitan dengan hal itulah hasil Sensus Penduduk 1990 akan mendasari pemotretan demografis di Jawa Barat. Sebagai bahan perbandingan, digunakan pula data hasil Sensus Penduduk 1971, 1980 dan 1990.

#### 2.2 Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Walaupun data mengenai jumlah penduduk pada suatu titik waktu itu penting, namun jauh lebih penting apabila dihitung pula perkembangannya. Dengan demikian, dua hal bisa diraih. Dari jumlah penduduk, bisa dilihat besaran pada suatu waktu dan ini

penting untuk perbandingan antar wilayah pada waktu yang bersangkutan. Sedangkan dengan mengetahui perkembangan, perbandingan yang menyangkut dimensi waktu (dari waktu ke waktu) dan dimensi ruang (antar wilayah) bisa dilakukan.

Dari hasil Sensus Penduduk 1980 tercatat bahwa jumlah penduduk Jawa Barat pada saat itu sebanyak 27.449.840 orang. Lima tahun kemudian, jumlah penduduk tersebut meningkat menjadi 30.830.365 orang. Selanjutnya, jumlah penduduk tahun 1990 berdasarkan Sensus Penduduk 1990 tercatat sebanyak 35.381.682 orang. Dengan jumlah sebesar ini, maka kini Jawa Barat mengantungi predikat propinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

Dilihat dari laju pertumbuhan tahunannya, Jawa Barat masih memberikan sumbangan yang cukup besar dalam membentuk laju pertumbuhan nasional. Tercatat bahwa laju pertumbuhan per tahun dalam kurun waktu 1971-1980 adalah 2,66 persen, sedangkan pada periode 1980-1990 mengalami penurunan menjadi 2,57 persen; suatu penurunan yang tidak berarti. Oleh karena laju pertumbuhan Jawa Barat merupakan resultan dari semua kabupaten dan kotamadya, maka wilayah-wilayah mana saja yang bertanggungjawab terhadap besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dilihat dalam Diagram 2.2.1.

Diagram 2.2.1: Kuadran Laju Pertumbuhan  
menurut Kabupaten/Kotamadya  
Tahun 1971-1990

		1971-1980	
		A	B
1 9 8 0   1 9 9 0	A	IV Kab. Bogor Kab. Bekasi Kab. Tangerang Kab. Serang	I Kod. Bandung
	B	Kab. Cirebon Kab. Bandung  III	Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kod. Bogor Kod. Sukabumi Kod. Cirebon II

Keterangan: A - di atas laju pertumbuhan Jawa Barat periode yang bersangkutan  
B - di bawah laju pertumbuhan Jawa Barat periode yang bersangkutan

Kuadran I adalah kuadran bagi daerah-daerah di mana pada periode 1971-1980 berada di bawah laju pertumbuhan Jawa

Barat sedangkan pada tahun 1980-1990 berada di atasnya. Kuadran II adalah kuadran untuk daerah-daerah di mana dalam kedua periode sensus tersebut berada di bawah laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat. Kuadran III merupakan kebalikan Kuadran I di mana daerah-daerah yang berada di dalamnya pada tahun 1971-1980 memiliki laju pertumbuhan di atas Jawa Barat sedangkan pada tahun 1980-1990 berada di bawahnya. Kuadran IV menunjukkan daerah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk per tahun untuk kedua periode sensus penduduk (1971-1980 dan 1980-1990) berada di atas rata-rata Jawa Barat.

Dengan melihat diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa kabupaten-kabupaten di Kuadran IV merupakan daerah-daerah yang konsisten mendorong tingginya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat dalam kedua periode tersebut. Sedangkan daerah-daerah yang berada di kuadran-kuadran III dan IV berandil besar dalam memacu tingginya laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat pada kurun waktu 1971-1980. Adapun daerah-daerah yang mendorong tingginya laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat pada periode 1980-1990 adalah daerah-daerah yang berada di kuadran-kuadran I dan IV.

Beradanya Kotamadya Bandung di Kuadran I dan Kabupaten Bandung di Kuadran III, pengamatan yang melibatkan keduanya tidak dapat dipisahkan. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk Kotamadya Bandung pada periode 1980-1990 (3,48 persen) dibanding

kan dengan periode 1971-1980 (2,20 persen) tidak bisa terlepas dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 1971-1980 (3,31 persen) menjadi 1,83 persen pada tahun 1980-1990. Keadaan demikian berkaitan dengan perluasan wilayah Kotamadya Bandung pada periode 1980-1990 di mana sebagian wilayah Kabupaten Bandung "diserahkan" kepada Kotamadya Bandung. Wilayah yang diserahkan kepada Kotamadya Bandung tersebut merupakan wilayah yang cukup padat penduduknya. Dengan demikian; bagi Kotamadya Bandung, selain perluasan wilayah sekaligus juga penambahan jumlah penduduk secara besar-besaran. Melihat hal demikian, tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kuadran I yang diwakili oleh Kotamadya Bandung tidak merefleksikan perkembangan penduduk yang diakibatkan oleh seleksi komponen kependudukan (fertilitas, mortalitas, dan migrasi). Begitu pula dengan Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, di kedua daerah tersebut, laju pertumbuhan penduduk selama dua periode sensus tersebut menjadi tidak komparabel. Berbeda dari keduanya, menurunnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cirebon malah lebih menggambarkan keadaan perilaku komponen kependudukan.

Angka laju pertumbuhan penduduk penduduk per kabupaten/kotamadya dalam kurun waktu 1971-1980 dan 1980-1990 selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.2.1.

Tabel 2.2.1: Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun  
per Kabupaten/Kotamadya  
periode 1971-1980 dan 1980-1990  
(%)

Kabupaten/ Kotamadya	1971-1980	1980-1990
Kab. Pandeglang	2,15	2,14
Lebak	2,48	2,49
Bogor	4,52	4,13
Sukabumi	2,51	1,99
Cianjur	2,33	1,82
Bandung	3,31	1,83
Garut	2,35	1,66
Tasikmalaya	2,15	1,31
Ciamis	1,21	0,78
Kuningan	1,97	1,27
Cirebon	2,73	2,16
Majalengka	2,01	1,40
Sumedang	1,40	1,40
Indramayu	2,53	1,58
Subang	1,89	1,25
Purwakarta	2,32	2,09
Karawang	2,31	1,89
Bekasi	3,57	6,29
Tangerang	4,04	6,10
Serang	2,85	2,86
Kod. Bogor	2,60	0,95
Sukabumi	1,48	0,88
Bandung	2,20	3,48
Cirebon	2,51	1,31
Jawa Barat	2,66	2,57

Sumber: BPS (1991)

Dapat disimpulkan, seperti dikemukakan di atas, bahwa tingginya laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat lebih konsisten disumbang oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk di kabupaten-kabupaten yang berada di Kuadran I (Kabupaten-kabupaten Bogor,

Tangerang, Bekasi, dan Serang). Wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi selama ini telah menjadi daerah pemukiman kembali bagi sebagian penduduk DKI Jakarta. Di samping itu, termasuk Kabupaten Serang, juga kawasan di Kuadran I ini merupakan wilayah industri yang banyak menyerap tenaga kerja dari luar wilayah tersebut (BPS, 1993: 12).

### 2.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Znanicki (1963: 410) mengemukakan pentingnya faktor latar belakang dalam mempelajari aspek geografis penduduk (persebaran). Faktor latar belakang tersebut berupa persaingan antara kelompok-kelompok sosial dalam memperebutkan wilayah-wilayah tertentu sebagai nilai umum yang mendasari faktor perubahan demografis. Gejala urbanisasi dan berbagai perubahan dalam organisasi sosial serta kebudayaan merupakan akibat adanya persebaran penduduk.

Persebaran penduduk ini tidak hanya mencakup pembagian jumlah penduduk saja, tetapi juga menyangkut komposisi dan tempat tinggal. Lebih jauh lagi dapat diamati faktor-faktor vital lainnya seperti masalah kesuburan, kematian, dan laju pertumbuhan penduduk. Apabila seluruh penduduk mengalami perubahan dalam jumlah, komposisi serta lokasinya, maka timbullah kekhasan daripada wilayah.

Jumlah penduduk di pedesaan Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Sebagai komplementernya, penduduk kota menjadi semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh data sensus penduduk 1971 yang mencatat jumlah penduduk kota sebanyak 12,42 persen, pada tahun 1980 meningkat menjadi 20,82 persen, dan sekitar 35 persen pada tahun 1990. Secara kuantitatif, istilah mengkotakan desa nampaknya memperlihatkan kemajuan.

Kepadatan aritmetis atau kepadatan penduduk yang dinyatakan dalam sekian penduduk per km<sup>2</sup> dari tahun ke tahun memperlihatkan kenaikan. Hal ini ditunjukkan oleh data beberapa sensus penduduk, yaitu pada tahun 1971 sebesar 489 orang per km<sup>2</sup>, pada tahun 1980 sebesar 628 orang per km<sup>2</sup>, dan pada tahun 1990 menjadi 818 orang per km<sup>2</sup>. Pergeseran kabupaten/kotamadya mengenai kepadatan penduduknya -dibandingkan dengan angka kepadatan penduduk Jawa Barat- dalam satu dekade (1980-1990) dapat dilihat dalam Diagram 2.3.1.

penduduknya berada di bawah kepadatan penduduk Jawa Barat, sedangkan pada tahun 1990 berada di atasnya. Kotamadya Bandung dalam Diagram 2.2.1 berada di kuadran ini, tetapi tidak demikian dalam Diagram 2.3.1. Ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk di Kotamadya Bandung ternyata diikuti pula oleh meningkatnya luas wilayah. Seperti dijelaskan di atas bahwa daerah perluasan yang terambil dari Kabupaten Bandung mencakup wilayah yang padat penduduknya. Dengan demikian tidak mengherankan apabila Kotamadya Bandung tetap berada dalam Kuadran IV di mana baik dalam tahun 1980 maupun tahun 1990 kepadatannya tetap tinggi (di atas rata-rata Jawa Barat). Sebaliknya Kabupaten Bandung meskipun sebagian wilayahnya masuk ke Kotamadya Bandung, namun jumlah penduduknya masih tetap tinggi.

Dengan luas wilayah yang tetap, Kabupaten-kabupaten Kuningan, Indramayu dan Majalengka berada di Kuadran III. Ini berarti bahwa selama satu dekade di kabupaten-kabupaten tersebut telah terjadi penurunan dalam pertumbuhan jumlah penduduk (lihat Tabel 2.2.1).

Dari data sensus penduduk tersebut, kepadatan penduduk agraris yang menyatakan sejumlah penduduk yang bertani dalam unit luas tanah garapan tidak dapat disajikan. Kepadatan penduduk jenis ini relatif jauh lebih penting dan lebih '*interpretable*' daripada kepadatan penduduk aritmetis yang memasukkan luas

Diagram 2.3.1: Kuadran Kepadatan Penduduk  
Menurut Kabupaten/Kotamadya  
Tahun 1980 dan 1990

		1980	
		A	B
1 9 9 0	A	IV Kab. Bogor Kab. Bandung Kab. Cirebon Kab. Karawang Kab. Bekasi Kab. Tangerang Kod. Bogor Kod. Sukabumi Kod. Bandung Kod. Cirebon	I -
	B	III Kab. Kuningan Kab. Indramayu Kab. Majalengka	II Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Sumedang Kab. Subang Kab. Purwakarta

Catatan : A - angka kepadatan penduduk di atas rata-rata  
Jawa Barat pada tahun-tahun yang bersangkutan  
B - angka kepadatan penduduk di bawah rata-rata  
Jawa Barat pada tahun-tahun yang bersangkutan

Tidak ada satu daerahpun yang menempati kuadran I. Hal ini berarti tidak satu daerahpun yang pada tahun 1980 kepadatan

wilayah secara global (termasuk areal yang tidak dihuni/di-usahakan oleh penduduk, seperti hutan, sungai, danau, dan tanah kuburan).

Apakah Jawa Barat sudah mengalami *overpopulation* (kelebihan penduduk) tidak begitu saja dapat dijelaskan dari besarnya angka kepadatan penduduk. Hal ini terjadi apabila kepadatan penduduk tersebut sudah berada di luar daya dukung (*carrying capacity*) dari wilayah Jawa Barat itu sendiri (Daldjoeni, 1986: 105). Mungkin saja secara propinsial masih belum kelebihan, namun untuk kabupaten/kotamadya tertentu keadaan kelebihan penduduk ini bisa terjadi. Dengan demikian potensi wilayah akan turut menentukan konsep kelebihan penduduk tersebut.

#### 2.4 Komposisi Penduduk

Secara struktural data kependudukan ini terdiri dari umur dan jenis kelamin. Kedua komposisi ini amat penting mengingat perilaku kelahiran, kematian dan migrasi memberikan spesifikasi yang berbeda pada setiap komposisi. Sebagai contoh, besarnya kelompok umur muda mengisyaratkan permasalahan yang akan dihadapi dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Sementara besarnya jumlah penduduk perempuan usia muda memberikan gambaran tentang kelahiran di masa yang akan datang.

Salah satu ukuran yang sering digunakan di dalam mengamati struktur umur penduduk ini adalah angka beban ketergantungan. Sebenarnya ukuran ini memiliki aspek ekonomis yang menyatakan seberapa banyak seseorang yang berusia produktif harus menanggung penduduk berusia belum produktif dan pasca usia produktif. Tentu saja dengan asumsi bahwa mereka yang tergolong dalam umur produktif ini bisa menjadi andalan bagi kedua kelompok di luarnya. Kenyataannya bisa saja seseorang yang dalam usia produktif itupun menjadi beban orang lain dalam kategori umur yang sama. Lepas dari itu, diferensial angka ketergantungan menurut geografis menarik untuk diamati.

Tabel 2.4.1: Komposisi umur dan Angka Beban Ketergantungan menurut Daerah, Tahun 1980 dan 1990

Uraian	K		P		K+P	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
% P(0-14)	40,30	35,65	42,79	38,57	42,26	37,56
% P(15-64)	57,05	61,42	54,10	57,50	54,72	58,86
% P(65+)	2,65	2,93	3,11	3,93	3,02	3,58
Beban Ketergantungan Anak	70,63	58,04	79,09	67,08	77,23	63,82
Beban Ketergantungan Tua	4,65	4,77	5,75	6,83	5,51	6,09
Beban Ketergantungan	75,28	62,81	84,84	73,91	82,74	69,91

Sumber: 1. BPS (1983a) diolah

2. BPS (1992) diolah

Catatan: K - Kota P - Pedesaan K+P - Kota dan Pedesaan

Secara umum, penduduk usia muda (0-14) tahun baik di kota maupun di pedesaan masih relatif tinggi. Hal ini merupakan akibat dari tingginya kelahiran pada tahun 70-an, terutama di pedesaan. Tetapi dari tahun ke tahun, yang ditunjukkan oleh data hasil Sensus Penduduk 1980 dan 1990, nampaknya kelahiran ini semakin menurun. Dengan demikian penduduk kota relatif lebih tua

dibandingkan penduduk pedesaan. Keadaan ini ditunjukkan dengan lebih besarnya persentase penduduk umur tua (65+) di perkotaan.

Perbedaan jumlah penduduk usia muda dan usia tua ini berpengaruh kepada berbagai aspek. Dengan masih besarnya penduduk umur muda memberikan indikasi untuk menyiapkan secara luas bidang pendidikan dan kesempatan kerja. Adapun membesarnya penduduk usia tua berkaitan dengan berbagai jaminan sosial.

Dilihat dari komposisi umur, penduduk usia produktif dihadapkan kepada dua kelompok penduduk yang membebani, yaitu penduduk usia muda karena mereka belum siap bekerja; dan penduduk usia tua karena mereka sudah purna karya. Seberapa besar seseorang yang berada dalam usia produktif harus menanggung kedua kelompok beban tersebut dinyatakan dalam angka beban ketergantungan.

Selama kurun waktu 1980-1990 angka ketergantungan ini memberikan kecenderungan menurun yaitu dari 82,74 pada tahun 1980 menjadi 69,91 pada tahun 1990. Di kota angka beban ketergantungan ini lebih kecil dibandingkan dengan di pedesaan. Ini disebabkan oleh karena perubahan struktur umur di kota jauh lebih cepat dibandingkan dengan di pedesaan.

## BAB III

### KOMPONEN PERUBAHAN PENDUDUK

#### 3.1 Pendahuluan

Jawa Barat, seperti negara berkembang pada umumnya, masih dililit oleh berbagai masalah demografi, diantaranya laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Secara demografis, di dalam peta nasional, Jawa Barat memiliki spesifikasi tersendiri. Jawa Barat yang merupakan propinsi di pulau Jawa yang dekat dengan ibu kota negara, ternyata memiliki komponen penduduk yang tinggi. Baik kelahiran, kematian, maupun migrasi masih memberikan angka yang tinggi.

Diketahui bahwa pada tahun 1990 jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 35.381.682 orang, sementara pada tahun 1980 tercatat sebanyak 27.449.840 orang. Selisih yang hampir mencapai delapan juta orang itu merupakan resultan dari ketiga komponen kependudukan tersebut.

#### 3.2. Fertilitas.

Fertilitas yang berpengaruh terhadap penambahan jumlah penduduk bagi Jawa Barat masih menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan propinsi lain di pulau Jawa, bahkan

dengan angka nasional sekalipun. Salah satu faktor yang berpengaruh, yaitu rendahnya usia kawin pertama.

Dari tahun ke tahun tingkat kelahiran, yang diukur dengan Total Fertility Rate (TFR) atau Angka kelahiran total, Jawa Barat menunjukkan penurunan. Secara relatif, hal ini bisa ditunjukkan oleh beberapa data yang tersedia. Pada periode 1967-1970 TFR untuk Jawa Barat adalah 6,335 sedangkan TFR secara nasional adalah 5,605. Pada tahun 1981-1984 TFR Jawa Barat turun menjadi 4,305 sementara untuk nasional menjadi 4,055. Keberhasilan program Keluarga Berencana di Jawa Barat memainkan peranan penting di dalam penurunan TFR ini. Tabel 3.2.1 mengilustrasikan keadaan Age Specific Fertility Rate (ASFR) dan TFR Jawa Barat tahun 1980 dan 1990. Secara matematis, TFR ini merupakan penjumlahan daripada ASFR untuk setiap umur perempuan. Oleh karena umur perempuan dikelompokkan ke dalam lima tahunan, maka penjumlahan ASFR tersebut harus dikalikan dengan lima.

Tabel 3.2.1: ASFR dan TFR  
Tahun 1980 dan 1990

Umur Perempuan	1980	1990
15-19	0,10940	0,06229
20-24	0,23378	0,15446
25-29	0,21111	0,15159
30-34	0,16284	0,11998
35-39	0,11172	0,07968
40-44	0,04829	0,03478
45-49	0,01495	0,01048
TFR	4,46045	3,06635

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>) diolah  
2. BPS (1992)

Catatan: Diolah dengan metoda "Last Life Birth"

Ukuran lain, walaupun kasar, yang sering digunakan untuk melihat pola fertilitas adalah Child Woman Ratio (CWR). CWR menyatakan banyaknya anak-anak umur 0-4 tahun per 1000 wanita usia reproduktif (15-49). CWR inipun menunjukkan penurunan. Telah terjadi penurunan CWR dari 701 pada tahun 1971 menjadi 636 pada tahun 1980 dan 474 untuk tahun 1990. Secara kasar angka ini memberikan indikasi telah terjadinya penurunan kelahiran dalam kurun waktu lima tahun sebelum pengumpulan data.

Berikut akan diuraikan tentang faktor-faktor demografis yang memiliki keterkaitan dengan fertilitas. Faktor-faktor tersebut diantaranya, jumlah perempuan yang pernah kawin, umur perempuan pada perkawinan pertama, dan Keluarga Berencana.

Walaupun secara tidak langsung, faktor pendidikan, dan faktor ketenagakerjaan, dengan memperhatikan daerah desa dan kota memberikan pengaruh terhadap penurunan fertilitas (Holidin, 1993).

Banyaknya perempuan yang pernah kawin di Jawa Barat akan mempunyai peranan terhadap angka kelahiran, terutama untuk kelompok umur muda. Persentase penduduk perempuan yang pernah kawin pada periode 1980-1990 menurun sebesar 4,36 persen yaitu dari 74,23 persen (1980) menjadi 69,37 persen (1990). Ditunjukkan oleh Tabel 3.2.1 bahwa penurunan persentase pada kelompok umur muda (15-24) jauh lebih besar dibandingkan dengan penurunan pada kelompok-kelompok umur yang lebih tua. Tentunya diharapkan bahwa penurunan ini dapat memberikan sumbangan terhadap penurunan angka kelahiran di Jawa Barat.

Dengan semakin meningkatnya umur perkawinan pertama diharapkan akan memberikan penurunan di dalam kelahiran. Median umur perkawinan pertama digunakan sebagai alat ukur di dalam profil ini. Walaupun median umur perkawinan menunjukkan peningkatan, tetapi nilai median tersebut masih tergolong rendah.

Ditampilkan pula rata-rata umur perkawinan pertama yang dihitung dengan metoda "Singulate Mean Age At First Marriage", biasa disingkat dengan SMAM (UN, 1983). Diasumsikan bahwa tidak terjadi perkawinan pada penduduk di bawah usia 15 tahun.

Hasilnya, rata-rata umur perkawinan pertama di Jawa Barat masih di bawah angka nasional. baik untuk daerah kota maupun pedesaan; walaupun di Jawa Barat sendiri telah terjadi peningkatan. SMAM tersebut meningkat dari 18,00 pada tahun 1971 menjadi 18,60 pada tahun 1980 dan menjadi 20,40 pada tahun 1990. SMAM untuk nasional adalah 19,60 pada tahun 1971, 20,00 pada tahun 1980 dan 21,90 pada tahun 1990. Selengkapnya angka-angka ini bisa dilihat dalam Tabel 3.2.2.

Tabel 3.2.2: Rata-rata Umur Perkawinan Pertama menurut daerah, Tahun 1971, 1980 dan 1990

Daerah	Tahun	Jawa Barat	Nasional
Kota	1971	20,90	21,10
	1980	21,20	21,80
	1990	22,70	24,00
Pedesaan	1971	17,50	18,80
	1980	17,80	19,40
	1990	18,90	20,80
Kota dan Pedesaan	1971	18,00	19,60
	1980	18,60	20,00
	1990	20,40	21,90

Sumber : 1. BPS (1974) diolah  
2. BPS (1983<sup>a</sup>) diolah  
3. BPS (1992)

Perhitungan lain dilakukan melalui median dengan hasil seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3.2.3.

Tabel 3.2.3: Median Umur Perkawinan Pertama menurut kelompok umur dan daerah Tahun 1980 dan 1990

Umur Perempuan	K		P		K+P	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
15-19	16,76	17,01	16,13	16,46	16,22	16,56
20-24	17,86	18,19	16,48	16,21	16,74	17,54
25-29	18,07	18,91	16,25	16,87	16,59	17,41
30-34	17,61	18,56	15,86	16,56	16,07	17,14
35-39	17,33	18,16	15,89	16,60	16,06	17,05
40-44	17,04	17,75	15,89	16,28	16,99	16,68
45-49	16,76	17,56	15,86	16,38	16,94	16,69
Total	16,52	17,93	16,00	16,55	16,22	16,93

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>) diolah  
2. BPS (1992)

Di atas telah dikemukakan bahwa Keluarga Berencana memainkan peranan yang besar di dalam menurunkan angka kelahiran. Mengingat Jawa Barat terus menerus meningkatkan dan mengembangkan program Keluarga Berencana ini. Tujuan ganda dari program Keluarga Berencana (KB) yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan Ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera secara umum telah membuahkan hasil. Dengan semakin banyaknya akseptor KB diharapkan tidak hanya sekedar menurunnya tingkat kelahiran, melainkan juga meningkatnya kesejahteraan ibu dan anak. Persentase peserta KB aktif di Jawa Barat selama periode 1987-1991 yang ditunjukkan dalam Tabel 3.2.4 mengalami peningkatan.

Tabel 3.2.4: Persentase Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi yang Digunakan Tahun 1987 dan 1990

Jenis Kontrasepsi	1987	1990	Persentase Perubahan
IUD	8,8	7,4	-1,4
MOW	2,2	1,2	-1,0
MOP	0,1	1,1	1,0
IMPLANT	0,1	3,0	2,9
MKET	11,2	12,7	1,5
Suntikan	13,3	18,9	5,6
Pil	18,0	17,8	-0,2
Kondom	0,8	0,3	-0,5
NON MKET	32,1	37,0	4,9
TOTAL METODA MODERN	43,3	49,7	6,4
TRADISIONAL	2,5	1,3	-1,2
SEMUA METODA	45,8	51,0	5,2

Sumber: 1. KS Propinsi Jawa Barat (1988)  
2. KS Propinsi Jawa Barat (1991<sup>a</sup>)

Peserta KB aktif yang menggunakan metoda modern telah meningkat dari 43,3 persen pada tahun 1987 menjadi 49,7 persen pada tahun 1991. Sementara pemakaian metoda tradisional telah menurun dari 2,5 persen pada tahun 1987 menjadi 1,3 persen pada tahun 1991. Di dalam metoda modern itu sendiri telah terjadi penurunan pemakaian bagi alat kontrasepsi IUD (1,4 persen) dan MOW (1,0 persen).

### 3.3. Mortalitas

Angka kematian bayi (AKB) biasa digunakan sebagai angka ringkasan dalam hal mortalitas. Oleh karena tersirat dalam AKB ini unsur gizi, pendidikan ibu, pendapatan rumahtangga, sanitasi dan faktor lingkungan, maka angka kematian ini merupakan suatu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, disamping sebagai indikator kesehatan.

Angka kematian bayi telah mengalami penurunan, baik secara regional maupun nasional. Walaupun dari waktu ke waktu mengalami penurunan, AKB Jawa Barat masih berada di atas AKB nasional. Indonesia pada tahun 1980 adalah 112 per 1000 kelahiran bayi, sementara AKB Jawa Barat masih 128,27. Selanjutnya, pada tahun 1990 AKB nasional telah mencapai 70 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan AKB Jawa Barat baru mencapai 89,13. Secara statistik, AKB memiliki hubungan negatif dengan Angka Harapan Hidup (AHH) pada umur 0 ( $e^0$ ). Apabila AKB rendah, maka AHH menjadi tinggi. AKB dan AHH per kabupaten/kotamadya pada tahun 1980 dan 1990 ditampilkan dalam Tabel 3.3.1.

Tabel 3.3.1: Perkiraan AKB dan AHH  
menurut Kabupaten/Kotamadya  
Tahun 1980 dan 1990

Kabupaten/ Kotamadya	AKB		AHH	
	1980	1990	1980	1990
Kab. Pandeglang	120,02	98,99	50,1	54,0
Lebak	146,91	96,71	45,4	54,5
Bogor	143,80	90,65	46,0	55,7
Sukabumi	132,13	96,71	47,9	54,5
Cianjur	129,02	100,50	48,4	53,8
Bandung	166,53	66,20	52,6	60,7
Garut	132,91	91,41	47,8	55,5
Tasikmalaya	115,52	95,96	50,9	54,7
Ciamis	116,86	94,44	56,4	55,0
Kuningan	101,26	61,58	53,6	61,9
Cirebon	112,52	71,59	51,5	59,6
Majalengka	136,80	78,52	47,1	58,2
Sumedang	95,20	57,74	54,7	62,7
Indramayu	143,02	103,53	46,1	53,2
Subang	129,02	74,67	48,5	59,0
Purwakarta	141,27	96,71	46,6	54,4
Karawang	149,25	109,52	45,0	52,0
Bekasi	150,80	93,68	44,8	55,0
Tangerang	146,13	82,31	45,6	57,3
Serang	139,91	123,77	46,6	49,3
Kod. Bogor	137,58	33,58	47,0	68,4
Sukabumi	83,82	57,74	57,1	62,8
Bandung	75,44	49,78	58,7	64,6
Cirebon	85,20	91,41	54,7	55,5
<b>JAWA BARAT</b>	<b>128,27</b>	<b>89,13</b>	<b>48,6</b>	<b>56,0</b>

Sumber: KS Prop Jawa Barat dan BAPPEDA Tk I Jawa Barat  
(1992)

AKB tertinggi pada tahun 1980 dicapai oleh kabupaten Bandung yakni 166,53 per 1000 kelahiran hidup dan AKB terendah dicapai oleh kotamadya Bandung yakni 75,44 per 1000 kelahiran hidup. Perubahan urutan ini telah berubah dalam satu dekade

berikutnya, di mana Kabupaten Serang merupakan kabupaten dengan AKB tertinggi (123,77) dan AKB terendah diraih oleh Kotamadya Bogor (33,58). AKB ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang terjadi di masing-masing daerah di samping tingkat kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat.

### 3.4. Migrasi

Penyebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya dalam mendapatkan pekerjaan, pendapatan penduduk yang rendah, dan meningkatnya pengangguran. Pelzer (1945: 197) mengusulkan masalah kelebihan penduduk ini dengan transmigrasi. Hingga sekarang program transmigrasi ini memang telah dilaksanakan. Namun, yang jauh lebih sulit yaitu persoalan perpindahan penduduk antar propinsi yang justru sudah padat.

Berpindahnya penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dapat dibagi ke dalam kedua kelompok yaitu migrasi permanen dan Sirkuler. Migrasi permanen adalah gerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan niat (maksud) untuk menetap di daerah tujuan. Sedangkan mobiltas sirkuler ialah gerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain tanpa niat untuk menetap di daerah tujuan. Penghitungan migrasi berdasarkan maksud/niat

tersebut tidak operasional karena dengan faktor-faktor tertentu dapat menyebabkan niat tersebut berubah.

Dalam aplikasinya, perhitungan migrasi dilakukan melalui beberapa pendekatan. Diantaranya, migrasi seumur hidup yang dihitung dengan memperhatikan perbedaan antara tempat pencacahan dengan tempat lahir. Migrasi total, pendekatan lainnya, dihitung dengan memperhatikan antara tempat tinggal terakhir dan tempat tinggal di mana ia dicacah. Selanjutnya migrasi resen didasarkan kepada perbedaan antara tempat tinggal sekarang dan tempat tinggal 5 tahun yang lalu.

Seperti ditunjukkan dalam Tabel 3.4.1. penduduk yang lahir di Pulau Sumatera dan kemudian berpindah ke Pulau Jawa selain cenderung semakin meningkat juga memiliki persentase terbesar dibandingkan dengan yang pindah dari pulau-pulau lainnya. Demikian pula perpindahan dari pulau Jawa ke Sumatera memiliki ciri yang serupa. Dari data tersebut, berapa banyaknya perpindahan dari Jawa Barat-luar Jawa Barat dan sebaliknya tidak nampak.

Tabel 3.4.1: Penduduk menurut Tempat Lahir dan Tempat Tinggal Sekarang Tahun 1971, 1980 dan 1990 (dalam ribuan orang)

Tempat Lahir	Tahun	Tempat Tinggal Sekarang					Jumlah
		Sumatra	Jawa	Kali- mantan	Sula- wesi	Kep Lain	
Sumatera	1971	18885	348	6	8	6	19253
	1980	24825	718	26	23	20	25612
	1990	32903	1014	48	28	33	34026
Jawa	1971	1735	75370	90	57	53	77305
	1980	2906	90000	374	167	137	93584
	1990	3387	105893	867	371	345	110863
Kalimantan	1971	71	75	5024	6	2	5124
	1980	20	122	6165	10	5	6322
	1990	22	189	7947	18	8	8184
Sulawesi	1971	90	98	23	8431	52	8694
	1980	145	137	124	10109	140	10655
	1990	71	173	190	11885	155	12474
Kep. Lain	1971	28	62	3	17	7741	7851
	1980	31	115	11	74	10126	10357
	1990	51	173	38	198	13092	13552
Luar Negeri	1971	46	75	6	7	6	140
	1980	40	59	10	8	7	124
	1990	19	59	3	6	4	91
Tak Ter- jawab	1971	-	-	-	-	-	-
	1980	29	66	7	10	11	123
	1990	19	25	3	4	7	58
Jumlah	1971	20801	76028	5152	8526	7860	118367
	1980	27996	91217	6717	10401	10446	146777
	1990	36472	107526	9096	12510	12644	179248

=Sumber : SP'71, SP'80 dan SP'90 Seri S<sub>1</sub> diolah

Namun demikian, Tabel 3.4.2 menyajikan data perpindahan antar propinsi di pulau Jawa. Dari tahun ke tahun terlihat bahwa neraca migrasi Jawa Barat mengalami surplus. Walaupun demikian,

migrasi netonya cenderung semakin mengecil dan mengarah kepada pencapaian tingkat yang seimbang. Migrasi masuk terdapat di

Tabel 3.4.2: Persentase Migrasi Masuk, Migrasi Keluar dan Migrasi Netto Semasa Hidup menurut Propinsi di Pulau Jawa Tahun 1971, 1980, dan 1985

Propinsi	Migrasi Masuk			Migrasi Keluar			Migrasi Netto		
	1971	1980	1985	1971	1980	1985	1971	1980	1985
DKI Jakarta	40,07	39,97	38,90	2,91	6,16	7,50	37,16	33,81	31,40
Jawa Barat	1,77	3,66	4,40	5,52	5,42	5,40	3,75	1,76	1,00
Jawa Tengah	4,07	5,65	7,80	10,73	9,21	22,40	6,66	2,65	14,60
DI Yogyakarta	1,19	1,38	1,90	8,22	12,73	12,30	7,03	11,34	10,40
Jawa Timur	1,17	1,60	1,80	2,94	5,47	5,80	1,77	3,87	4,00

Sumber BPS tahun 1987

Propinsi DKI Jakarta, pada tahun 1971 sekitar 40,07 persen, dan pada tahun 1985 menjadi 38,90 persen. Sedangkan Propinsi Jawa Barat, angka migrasi masuk ada kecenderungan semakin meningkat dari 1,77 persen (1971) menjadi 3,66 persen (1980) dan meningkat lagi menjadi 4,40 persen (1985). Tetapi disisi lain mereka yang keluar dari Jawa Barat ada tendensi semakin menurun dari 5,52 persen (1971) menjadi 5,42 persen (1980) dan turun lagi menjadi 5,40 persen (1985). Perbedaan

antara migrasi masuk dan keluar ini akan mengakibatkan migrasi netto semakin mengecil seperti pada tahun 1971, 1980 dan 1985 masing-masing sekitar 3,75 persen, 1,76 persen dan 1,00 persen.

Tabel 3.4.3: Persentase Migrasi Masuk, Migrasi Keluar dan Migrasi Netto Menurut Tempat Tinggal Lima Tahun yang lalu di Pulau Jawa Tahun 1980 dan 1985.

Propinsi	Migrasi Masuk		Migrasi Keluar		Migrasi Netto	
	1980	1985	1980	1985	1980	1985
DKI Jakarta	13,6	9,9	7,0	5,8	6,6	4,1
Jawa Barat	2,2	2,1	2,0	1,3	0,2	0,8
Jawa Tengah	0,8	0,7	4,1	2,6	-3,3	-1,9
DI Yogyakarta	7,8	4,2	3,0	3,9	0,8	0,3
Jawa Timur	0,8	0,6	2,2	1,2	-1,4	-0,6

Sumber BPS tahun 1987

Dari Tabel 3.4.3, ternyata bahwa DKI Jakarta mempunyai migrasi masuk terbesar, dibandingkan dengan Propinsi-propinsi di Pulau Jawa. Hal ini sejalan dengan migrasi berdasarkan tempat lahir. Bahwa DKI Jakarta sebagai tempat tujuan para migran karena tersedianya sarana dan prasarana yang lebih lengkap dibandingkan dengan Propinsi lain: Propinsi Jawa Barat, mengalami migrasi netto yang semakin menaik dari 0,2 persen (1980) menjadi 0,8

persen (1985). Hal tersebut karena makin bertambahnya para migran yang masuk ke Propinsi Jawa Barat.

Dari para migran di Jawa Barat, beberapa alasan dari mereka mengapa pindah, ternyata hampir sebagaimana migran menjawab alasan lainnya paling dominan sehingga mereka pindah, baik di kota maupun di pedesaan Jawa Barat. Sedangkan alasan pindah karena pekerjaan menempati urutan kedua yang terbesar baik laki-laki maupun perempuan. Sekolah merupakan alasan pindah yang terkecil prosentasenya, sedangkan alasan pindah karena transmigrasi tidak ada. (Lihat Tabel 3.4.4).

<https://jabar.bps.go.id>

Tabel 3.4.4 : Persentase Migran Berdasarkan Tempat Tinggal Terakhir Sebelumnya dan Alasan Pindah, Tahun 1985

Alasan Pindah	K o t a		P e d e s a a n	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Transmigrasi	-	-	-	-
Pekerjaan	41,6	14,0	24,6	8,7
Sekolah	8,8	6,7	3,3	3,1
Lainnya	49,6	79,3	71,9	87,9
Tak Terjawab	-	-	0,2	0,3
J u m l a h	100,0 (1036429)	100,0 (961422)	100,0 (850027)	100,0 (708498)

Sumber: BPS (1987)

Tabel 3.4.5: Rasio Jenis Kelamin Migran Masuk Menurut Jenis Migran per Wilayah Pembangunan, Tahun 1984

Wilayah Pembangunan	Semasa Hidup	Total	Risen
Banten	113,11	111,56	111,20
Botabek	113,54	111,99	108,03
Sukabumi	129,65	118,56	130,10
Bandung Raya	130,22	135,55	140,07
Priangan Timur	245,46	247,59	381,04
Cirebon	130,60	142,17	162,05
Purwasuka	119,70	118,64	98,35

Sumber : Bappeda TK.I dan KS Jabar, 1985

Berdasarkan rasio jenis kelamin, para migran masuk paling banyak didominasi oleh laki-laki. Ini ditunjukkan oleh

rasio jenis kelamin di masing-masing wilayah pembangunan di Jawa Barat yang melebihi 100 (Tabel 3.4.5), kecuali untuk Wilayah Pembangunan Purwasuka. Angka ini mengisyaratkan bahwa migrasi yang dilakukan masih beralasan umum, yaitu mencari pekerjaan atau melanjutkan sekolah. Cukup menarik perhatian untuk diteliti lebih jauh, di mana migran masuk ke Wilayah Pembangunan Purwasuka untuk jenis migrasi risen justru lebih banyak dilakukan oleh kaum wanita. Tidak terdapat informasi dari data yang ada apakah kaum pria di wilayah ini banyak yang beristri berasal dari luar wilayah ini.

<https://jabar.bps.go.id>

Tabel 3.4.6 : Persentase Migran Masuk menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 1984

Wilbang	Tingkat Pendidikan	Semasa Hidup	Total	Risen
Banten	Rendah	65,15	56,65	54,57
	Menengah	40,35	40,00	42,20
	Tinggi	3,50	3,35	3,23
Botabek	Rendah	56,14	56,63	55,25
	Menengah	40,36	40,02	41,57
	Tinggi	3,50	3,35	3,18
Sukabumi	Rendah	71,16	73,08	70,30
	Menengah	27,83	25,99	28,47
	Tinggi	1,01	0,93	1,23
Bandung Raya	Rendah	66,30	67,07	64,83
	Menengah	30,75	20,45	31,95
	Tinggi	2,95	3,48	3,23
Priangan Timur	Rendah	86,94	87,77	79,78
	Menengah	12,30	11,60	18,54
	Tinggi	0,76	0,63	1,68
Cirebon	Rendah	58,42	63,85	63,23
	Menengah	39,15	33,66	33,98
	Tinggi	2,47	2,49	2,79
Purwasuka	Rendah	81,84	82,26	83,74
	Menengah	17,59	17,16	15,42
	Tinggi	0,57	0,58	0,84

Sumber : Bappeda Tingkat I Jawa Barat dan KS Jawa Barat (1985)

Keterangan : Rendah = Belum/tdk Sekolah, Blm tamat SD, tamat SD

Menengah = SMTP dan SMTA

Tinggi = Akademi/Universitas

Sejalan dengan tingkat pendidikan dari masyarakat Jawa Barat yang mayoritas berpendidikan tamat SD, demikian halnya para

migran masuk. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 3.4.6. Perpindahan penduduk yang dilakukan oleh mereka yang berpendidikan rendah biasanya mereka mengadu nasib untuk memasuki sektor informal. Dengan bekal pendidikan yang minim tersebut, sulit bagi mereka untuk bersaing di dalam memperoleh pekerjaan di sektor formal.

## BAB. IV PENDIDIKAN

### 4.1. Pendahuluan

Sejumlah ukuran pendidikan telah digunakan dalam analisa demografi. Secara garis besar, terdapat tiga ukuran pendidikan, yaitu: a. ukuran input pendidikan. Termasuk di dalamnya net enrolment ratio;

b. ukuran progres pendidikan. Angka masih sekolah termasuk ke dalam kriteria ini; dan

c. ukuran output pendidikan, seperti buta huruf, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Angka melek huruf dan tingkat partisipasi kedua-duanya telah memperlihatkan perbaikan yang cukup nyata. Namun, karena perkembangan ini tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk, sehingga banyaknya anak-anak yang putus sekolah dan buta hurufpun tetap meningkat.

Telah disebutkan di atas, bahwa angka buta huruf merupakan salah satu alat ukur di bidang pendidikan. Tingkat pendidikan yang ditamatkan, kemampuan berbahasa Indonesia, dan tingkat partisipasi sekolah merupakan jenis alat ukur lainnya dalam bidang pendidikan.

#### 4.2. Angka Buta Huruf

Secara umum, angka buta huruf memberikan indikasi terhadap status pendidikan penduduk, juga merupakan indikasi daripada tingkat sosial ekonomi suatu bangsa (Shryock dan Siegel, 1980: 326). Apabila angka buta huruf tinggi, maka status pendidikan dan sosial ekonomi penduduk rendah. Di samping itu, Ananta (1985) mengatakan bahwa angka buta huruf merupakan suatu determinan mutu modal manusia yang relevan karena dengan menurunnya buta huruf maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut lebih siap menerima ide-ide baru yang diperlukan dalam suatu pembangunan. Membandingkan data buta huruf antara desa dan kota penting untuk mengatur strategis program pendidikan di kedua wilayah geografis tersebut.

Seperti ditunjukkan oleh Tabel 4.2.1, angka buta huruf di daerah kota lebih rendah daripada angka di daerah pedesaan. Lebih banyaknya sarana dan prasarana pendidikan di kota merupakan salah satu penyebab ketimpangan kota-pedesaan ini. Lebih besarnya peluang bagi penduduk kota untuk bisa memperoleh pendidikan formal merupakan alasan lainnya. Pada tahun 1990 angka buta huruf di kota tercatat sebanyak 8,05 per sen sementara di daerah pedesaan mencapai 17,31 persen.

Tabel 4.2.1: Persentase Tingkat Buta Huruf menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tahun 1980 dan 1990

Daerah	Laki-laki		Perempuan		Laki+Perempuan	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
1. Kota	6,98	3,88	20,31	10,33	14,14	8,05
2. Desa	17,26	9,87	36,51	21,35	32,37	17,31
3. Kota+Desa	12,14	6,88	28,54	15,87	24,98	12,70

Sumber SP 1971, SP 1980 dan SP 1990 (Print Out Computer)

Membandingkan angka buta huruf dengan distribusi umur, diperoleh gambaran bahwa untuk semua jenis kelamin angka buta huruf ini memperlihatkan korelasi positif, seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 4.2.2. Artinya angka buta huruf meningkat sejalan dengan menuanya usia. Keadaan ini tidak bersifat universal. Diperkirakan satu atau dua dekade mendatang, pola ini akan berubah. Pengamatan mengenai buta huruf menurut umur ini akan lebih jelas apabila dilakukan melalui analisa kohor.

Tabel 4.2.2: Persentase Tingkat Buta Huruf Menurut Daerah dan Umur Tahun 1980 dan 1990

Umur	Kota		Pedesaan		Kota+Pedesaan	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
10-14	3,19	0,84	8,33	2,00	7,22	1,61
15-19	3,55	0,76	13,31	2,39	10,75	1,75
20-24	4,88	1,63	18,11	5,36	14,75	3,82
25-29	5,39	3,58	19,95	10,12	16,75	7,68
30-34	7,44	5,09	25,96	13,84	22,27	10,61
35-39	11,84	6,26	31,12	16,04	27,39	12,66
40-44	20,22	9,48	42,92	22,52	38,50	18,33
45-49	27,55	12,61	48,51	26,04	44,58	21,83
50+	40,31	28,28	61,83	44,90	57,72	40,01
Tak Terjawab	8,06	45,51	59,01	69,18	58,84	64,26

Sumber: SP 1971, SP 1980 dan SP 1990 (Print Out Computer)

Keadaan buta huruf per kabupaten/kotamadya dapat dilihat dalam Tabel 4.2.3. Sejak tahun 1971, angka buta huruf di setiap kabupaten/kotamadya terus menurun. Pada tahun 1990, angka buta huruf terkecil (2,67 persen) diperlihatkan oleh Kotamadya Bandung, sementara Kabupaten Indramayu masih memiliki angka buta huruf terbesar yaitu 35,26 persen. Perbedaan angka buta huruf

per kabupaten/kotamadya ini menunjukkan adanya diferensiasi pendidikan yang menyangkut diantaranya kebudayaan, kesadaran, dan pendapatan masyarakat.

Tabel 4.2.3: Persentase Tingkat Buta Huruf Menurut Kabupaten/Kotamadya 1971, 1980 dan 1990

Kabupaten/Kotamadya	1971	1980	1990
Kab. Pandeglang	28,62	22,89	12,16
Kab. L e b a k	46,62	26,85	16,37
Kab. B o g o r	45,76	29,17	11,67
Kab. Sukabumi	31,16	19,44	9,55
Kab. Cianjur	30,25	17,39	7,82
Kab. Bandung	24,93	14,61	6,85
Kab. G a r u t	21,44	18,53	8,11
Kab. Tasikmalaya	22,49	11,58	5,38
Kab. C i a m i s	27,07	17,21	9,07
Kab. Kuningan	35,20	22,78	13,90
Kab. Cirebon	42,51	35,90	20,80
Kab. Majalengka	34,44	27,51	14,56
Kab. Sumedang	22,08	16,35	7,84
Kab. Indramayu	64,55	52,57	35,26
Kab. S u b a n g	51,41	37,53	22,11
Kab. Purwakarta	31,55	21,06	10,33
Kab. Karawang	50,02	44,76	22,96
Kab. B e k a s i	61,32	46,32	18,61
Kab. Tangerang	48,10	33,72	13,99
Kab. S e r a n g	33,45	28,29	14,26
Kod. B o g o r	19,99	12,92	4,05
Kod. Sukabumi	12,75	8,94	3,16
Kod. Bandung	20,24	7,15	2,67
Kod. Cirebon	13,32	13,76	7,47
Jawa Barat	35,16	4,98	12,70

Sumber SP 1971, SP 1980 dan SP 1990 (Print Out Computer)

Sekitar 12,70 persen dari seluruh penduduk Jawa Barat masih berstatus buta huruf. Kabupaten dan Kotamadya yang

memiliki angka buta huruf terendah berturut-turut yaitu Tasikmalaya (5,38 persen) dan Bandung (2,67); sementara Kabupaten Indramayu (35,26 persen) dan Kotamadya Cirebon (7,47) tercatat sebagai dua daerah yang memiliki angka buta huruf tertinggi.

Dilihat dari komposisi jenis kelamin, persentase buta huruf penduduk laki-laki di Jawa Barat lebih rendah dibandingkan dengan persentase untuk penduduk perempuan. Hal ini konsisten untuk setiap tahun. Pada tahun 1990 persentase buta huruf laki-laki sebesar 6,88 persen sedangkan perempuan 15,87 persen (Tabel 4.2.1).

Membandingkan angka buta huruf dengan kelompok umur baik di kota maupun di pedesaan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- a. secara horisontal (untuk kelompok umur yang sama dan tahun yang berbeda) angka buta huruf menunjukkan penurunan;
- b. secara vertikal (untuk kelompok umur yang berbeda pada tahun yang sama) angka buta huruf di Jawa Barat memperlihatkan korelasi positif;
- c. secara diagonal (untuk suatu kelompok umur pada tahun 1980 dibandingkan dengan kohor tersebut pada tahun 1990) angka buta huruf cenderung meningkat, kecuali untuk usia 10-14 pada tahun 1980. Diduga faktor migrasi berperan dalam

masalah ini. Fenomena demikian cukup menarik untuk diteliti lebih jauh.

Bagaimana posisi angka buta huruf Jawa Barat bila dibandingkan dengan propinsi-propinsi lain di seluruh Indonesia. Tabel 4.2.4 menyajikan informasi tersebut.

Tabel 4.2.4: Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Yang Buta Huruf Menurut Propinsi dan Daerah Tahun 1980 dan 1990

Propinsi/ Kepulauan	Kota		Pedesaan		Kota+Pedesaan	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
1. Jawa	15,6	8,4	35,6	21,9	30,5	16,9
a. DKI Jakarta	10,9	4,5	25,1	-	11,7	4,5
b. Jawa Barat	12,1	6,1	28,5	16,0	25,0	12,7
c. Jawa Tengah	20,3	11,9	36,7	21,6	33,6	18,9
d. Jawa Timur	15,4	13,5	34,8	26,1	30,4	20,4
e. DI Yogyakarta	15,4	11,0	41,0	27,2	36,8	22,7
2. Sumatra	9,1	4,2	22,4	11,1	19,7	9,3
3. Kalimantan	14,2	6,4	34,1	15,0	29,6	12,5
4. Sulawesi	13,7	7,0	32,0	19,7	28,9	16,8
5. Kepulauan lain	16,7	9,2	40,3	29,1	37,1	25,3
Indonesia	14,5	7,6	33,2	19,7	28,8	15,8

Sumber SP 1971, SP 1980 dan SP 1990 (Print Out Computer)

Dalam beberapa hal, ternyata angka buta huruf di Jawa Barat masih terlihat tinggi.

#### 4.3. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan, seperti halnya tingkat buta huruf, merupakan ukuran output pendidikan. Tingkat kualitas data ini tergantung kepada seberapa jauh kekeliruan yang dibuat dalam menyatakan suatu level pendidikan tertinggi. 'Misreporting' dapat secara sengaja dibuat oleh responden untuk alasan prestise, atau mungkin tidak sengaja untuk orang yang berumur tua karena faktor lupa.

Walaupun secara nasional data ini bisa diperbandingkan, namun tidak demikian secara internasional oleh karena perbedaan jenis tingkatan pendidikan. Meskipun secara nasional tidak masalah, namun Shryock dan Siegel (1980: 333) menyarankan bahwa kualitas data dari kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari sensus perlu diteliti terlebih dahulu.

Menurut sensus, seseorang dikatakan "tamat" dari suatu tingkat pendidikan tertentu jika orang tersebut meninggalkan sekolah setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi dari tingkatan sekolah tersebut sampai akhir dengan mendapatkan tanda tamat/Ijazah baik dari sekolah Negeri maupun Swasta. Seperti dalam Tabel 4.3.1, peningkatan persentase penduduk yang menamatkan suatu jenjang pendidikan formal terjadi pada hampir semua tingkat pendidikan baik di kota maupun di pedesaan, kecuali untuk mereka yang tergolong tidak/belum tamat SD. Kenyataan ini

tentunya merupakan cerminan dari semakin meningkatnya pendapatan masyarakat, kesadaran orangtua, dan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pendidikan. Namun demikian, 'diskriminasi' pendidikan menurut jenis kelamin masih tetap terlihat dari lebih rendahnya persentase yang dimiliki penduduk perempuan (Tabel 4.3.2).

<https://jabar.bps.go.id>

Tabel 4.3.1: Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Daerah Tahun 1980 dan 1990

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	K o t a		Pedesaan		Kota+Pedesaan	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
1. Tidak/Belum Pernah Sekolah	-	7,43	-	17,02	-	13,64
2. Tidak/Belum Tamat SD	40,78	24,39	63,87	37,21	57,97	32,69
3. Sekolah Dasar	31,55	31,25	29,66	36,30	30,14	34,52
4. SMTP Umum	12,11	14,75	2,94	4,88	5,28	8,37
5. SMTP Kejuruan	2,36	1,18	0,78	0,44	1,19	0,71
6. SMTA Umum	6,74	11,35	0,98	1,90	2,45	5,24
7. SMTA Kejuruan	5,02	6,42	1,61	1,87	2,48	3,48
8. Diploma I/II	-	0,53	-	0,09	-	0,25
9. Akademi	0,77	1,15	0,10	0,16	0,27	0,48
10. Universitas	0,67	1,54	0,07	0,13	0,22	0,63
<b>JUMLAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS (1983a)  
BPS (1992)

Tabel 4.3.2: Penduduk Yang Berumur 10 tahun Keatas  
Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan  
Jenis Kelamin Tahun 1990  
(%)

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Lk	Pr	Lk+Pr
1. Tidak/Belum Pernah Sekolah	1166382 (8,88)	2432048 (18,35)	3598430 (13,64)
2. Tidak/belum Tamat SD	4261473 (32,46)	4363241 (32,92)	8624714 (32,69)
3. Sekolah Dasar	4699327 (35,79)	4408243 (33,26)	9107570 (34,52)
4. SMTP Umum	1227633 (9,35)	981479 (7,41)	2209112 (8,37)
5. SMTP Kejuruan	110976 (0,85)	75231 (0,57)	186207 (0,71)
6. SMTA Umum	857181 (6,53)	524439 (3,96)	1381620 (5,24)
7. SMTA Kejuruan	567702 (4,32)	349955 (2,64)	917657 (3,48)
8. Diploma I/II	37726 (0,29)	26973 (0,20)	64699 (0,25)
9. Akademi	83241 (0,63)	43190 (0,33)	126431 (0,48)
10. Universitas	116892 (0,89)	48784 (0,37)	165676 (0,63)
11. Tak Terjawab	198 (0,00)	128 (0,00)	326 (0,00)
Jumlah	13128731 (100,00)	13253711 (100,00)	26382442 (100,00)

Sumber: BPS (1992)

#### 4.4 Kemampuan Berbahasa Indonesia

Oleh karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan sekaligus merupakan alat komunikasi utama, maka kemampuan berbahasa Indonesia memberikan dukungan yang kuat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terdapat sekitar 6,38 persen bagi laki-laki dan 9,78 persen bagi perempuan pada tahun 1990 yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

Tabel 4.4.1: Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kotamadya, Bahasa yang Dipakai Sehari-hari dan Jenis Kelamin Tahun 1990

Kabupaten/ Kotamadya	Bahasa Indonesia		Bukan Bahasa Indonesia		Bahasa Indonesia		Jumlah
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
<b>Kabupaten:</b>							
Pandeglang	0,61	0,47	40,01	35,91	9,81	13,18	100,00
Lebak	0,49	0,42	39,05	33,02	11,37	15,65	100,00
Bogor	17,93	17,35	27,91	25,23	4,86	6,72	100,00
Sukabumi	0,56	0,42	41,46	37,33	8,34	11,88	100,00
Cianjur	0,53	0,46	41,65	38,46	8,09	10,81	100,00
Bandung	2,67	2,50	40,69	38,84	6,38	8,91	100,00
Garut	0,14	0,11	41,52	39,43	7,81	10,98	100,00
Tasikmalaya	0,31	0,24	43,44	42,50	5,45	8,06	100,00
Ciamis	0,10	0,11	42,91	41,20	5,92	9,76	100,00
Kuningan	0,29	0,21	42,86	39,53	6,47	10,63	100,00
Cirebon	1,35	1,45	39,58	34,00	8,57	15,05	100,00
Majalengka	0,48	0,31	41,33	37,98	7,34	12,57	100,00
Sumedang	0,24	0,18	43,44	41,35	6,00	8,79	100,00
Indramayu	0,58	0,49	36,75	27,75	12,31	22,13	100,00
Subang	0,61	0,53	40,03	34,63	8,78	15,42	100,00
Purwakarta	1,27	1,00	41,71	37,51	7,64	10,87	100,00
Karawang	4,28	4,25	36,59	30,90	9,17	14,81	100,00
Bekasi	33,24	32,93	14,56	13,63	2,23	3,41	100,00
Tangerang	27,84	26,79	19,82	17,98	2,93	4,64	100,00
Serang	3,35	2,85	39,48	34,05	7,64	12,64	100,00
<b>Kotamadya:</b>							
Bogor	18,68	17,96	29,99	29,94	1,36	2,06	100,00
Sukabumi	9,24	7,46	38,75	40,12	1,77	2,67	100,00
Bandung	9,80	9,59	38,47	37,54	1,90	2,70	100,00
Cirebon	17,94	19,85	28,80	27,78	2,09	3,54	100,00
Jawa Barat	7,66	7,42	35,93	32,82	6,38	9,78	100,00

Sumber : BPS (1992)

Seperti halnya peta angka buta huruf, Indramayu merupakan kabupaten yang memiliki persentase terbesar dari penduduk yang tidak bisa bahasa Indonesia; sedangkan untuk tingkat kotamadya dipegang oleh kotamadya Cirebon. Selanjutnya, sudah merupakan situasi yang umum bahwa penduduk yang tidak bisa bahasa Indonesia lebih banyak di daerah pedesaan.

#### 4.5 Partisipasi Sekolah

Data mengenai 'masih sekolah' termasuk alat ukur mengenai progres pendidikan. Banyaknya penduduk yang masih sekolah sering diidentikkan dengan besarnya penduduk yang tidak berada di pasar kerja. Dengan kata lain, hal ini bisa membendung besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Angka Masih Sekolah (School Enrollment Rate), rasio antara jumlah murid pada usia tertentu dengan jumlah penduduk pada usia yang sama, dipakai sebagai alat untuk mengukur tingkat kesertaan penduduk dalam pendidikan. Angka masih sekolah penduduk laki-laki pada tahun 1990 adalah sebagai berikut: untuk tingkat SD mencapai 89,58 persen, SMTP sebesar 49,82 persen, SMTA sebesar 32,40 persen, Universitas sebesar 10,86 persen. Pola demikian berlaku pula bagi penduduk perempuan, hanya nilai persentasenya yang lebih kecil.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa statistik demografi yang menyangkut pendidikan, lepas dari tinggi rendahnya mutu

data, mencerminkan pengaruh sejumlah faktor, diantaranya budaya, sosial, ekonomi dan psikologi masyarakat yang perlu dipertimbangkan di dalam setiap analisis data.

<https://jabar.bps.go.id>

## BAB.V. KETENAGAKERJAAN

### 5.1. Pendahuluan

Walaupun semua orang mengkonsumsi barang dan jasa, hanya sebagian penduduk yang terlibat di dalam produksi barang dan jasa. Anak-anak, orang-orang lanjut usia, dan mereka yang tidak berkemampuan baik fisik maupun mental, tidak terlibat di dalam kegiatan ekonomi tersebut. Tetapi mereka menjadi beban dari orang-orang yang secara ekonomis aktif di dalam memproduksi barang dan jasa. Penduduk yang aktif di dalam kegiatan ekonomi tersebut dikenal sebagai tenaga kerja.

Pengumpulan data ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik sejak tahun 1961 menggunakan konsep Labor Force Standard (Badan Penelitian dan Pengembangan Depnaker & Transmigrasi dan BPS, 1982). Namun suatu fenomena tidak selalu bisa didekati dengan konsep ini, oleh karena itu pengembangan konsep telah dilakukan. Analisa ketenagakerjaan secara komprehensif sangat membutuhkan data yang dapat dipercaya dan cukup terperinci. Biro Pusat Statistik menyediakan data ketenagakerjaan, baik dari sensus maupun survei-survei khusus.

Penduduk usia kerja di Indonesia mencakup penduduk berumur 10 tahun ke atas. Olehkarena angkatan kerja merupakan

subset dari penduduk usia kerja, maka angkatan kerjapun dipengaruhi oleh komposisi umur dan jenis kelamin. Jadi, apabila terdapat kenaikan jumlah penduduk menurut umur, maka penduduk usia kerja dan angkatan kerjapun akan mengalami kenaikan.

## 5.2. Komposisi Tenaga Kerja

Penduduk usia kerja menurut jenis kegiatannya dapat dibedakan ke dalam angkatan kerja yang terdiri dari penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan; dan bukan angkatan kerja yakni penduduk yang masih sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya. Dalam Tabel 5.2.1 dapat dilihat bahwa baik jumlah penduduk maupun jumlah penduduk angkatan kerja terus mengalami kenaikan. Demikian pula laju pertumbuhannya. Laju pertumbuhan angkatan kerja dalam periode 1971-1980 sebesar 2,89 persen per tahun, tetapi pada periode 1980-1990 laju pertumbuhan tersebut menanjak hampir dua kali lipatnya, yaitu menjadi 4,22 persen per tahun. Antara kota dan pedesaan, banyaknya penduduk angkatan kerja di pedesaan jauh lebih banyak daripada di pedesaan. Ini sejalan dengan jumlah penduduknya. Meskipun demikian, laju pertumbuhan angkatan kerja di kota lebih cepat daripada laju pertumbuhan di desa. Walaupun fasilitas pendidikan, yang dapat membendung angkatan kerja, di daerah kota lebih tersedia, namun cepatnya laju pertumbuhan angkatan kerja di kota lebih disebabkan oleh membanjirnya para

pencari kerja dari desa. Sejalan dengan sosial budaya Jawa Barat, bahkan Indonesia, angkatan kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan angkatan kerja perempuan.

<https://jabar.bps.go.id>

Tabel 5.2.1: Laju Pertumbuhan menurut Jenis Kelamin dan Daerah 1971, 1980 dan 1990. (%)

Laju Pertumbuhan	Tahun	Kota			Pedesaan			Kota+Pedesaan		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1. Penduduk	1971/1980	8,89	8,65	8,77	1,62	1,37	1,49	2,79	2,52	2,65
	1980/1990	7,80	7,76	7,78	0,75	0,59	0,67	2,64	2,50	2,57
2. Angkatan Kerja	1971/1980	9,18	9,07	9,15	2,24	1,05	1,89	3,25	2,03	2,89
	1980/1990	9,72	12,21	10,40	1,96	2,87	2,22	3,89	5,05	4,22

Sumber : 1. BPS (1974)  
2. BPS (1983a)  
3. BPS (1992)

Keterangan : L = Laki-laki  
P = Perempuan

Berdasarkan Tabel 5.2.2 diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), yang dihitung dengan membandingkan penduduk angkatan kerja dan penduduk usia kerja, telah mengalami kenaikan. TPAK tahun 1980 adalah 45,41 persen dan pada tahun 1990 menjadi 49,72 persen. Kenaikan semacam ini terjadi pula baik untuk penduduk yang bekerja maupun yang mencari kerja.

Tabel 5.2.2 : Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kegiatan, Jenis Kelamin dan Daerah 1980 dan 1990.

Jenis Kegiatan	Tahun	Kota			Pedesaan			Kota+Pedesaan		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1. Angkatan Kerja	1980	57,81	19,36	38,50	69,14	26,19	47,32	66,66	24,72	45,41
	1990	65,02	27,41	46,19	72,86	30,72	51,65	70,08	29,55	49,72
a. Bekerja	1980	56,22	18,78	37,42	68,14	25,42	46,44	65,53	23,99	44,48
	1990	61,45	25,48	43,44	70,88	29,31	49,96	67,54	27,96	47,66
b. Mencari Peker.	1980	1,59	0,58	1,08	1,00	0,77	0,88	1,13	0,73	0,93
	1990	3,57	1,93	2,75	1,98	1,41	1,69	2,54	1,59	2,06
2. Bukan Angkatan Kerja	1980	42,18	80,64	61,50	30,86	73,81	52,68	33,34	75,28	54,59
	1990	34,98	72,59	53,81	27,14	69,28	48,35	29,92	70,45	50,28
a. Sekolah	1980	27,46	22,08	24,76	16,87	12,91	14,86	19,19	14,88	17,01
	1990	23,61	20,46	22,03	15,70	13,35	14,52	18,50	15,85	17,17
b. Mengurus Rmt	1980	0,81	47,61	24,32	1,09	49,44	25,65	1,03	49,05	25,36
	1990	0,87	44,14	22,54	0,94	46,73	23,98	0,92	45,82	23,47
c. Lainnya	1980	13,91	10,94	12,42	12,91	11,46	12,18	13,13	11,35	2,23
	1990	10,49	7,99	9,24	10,50	9,20	9,85	10,50	8,78	9,63
Jumlah (1+2)		setiap kolom berjumlah 100,00								

Sumber : 1. BPS (1983a)  
2. BPS (1992)

Keterangan : L = Laki-laki  
P = Perempuan

Membandingkan angkatan kerja di desa dan di kota, sudah disebutkan di atas bahwa volume angkatan kerja di desa lebih besar daripada volume di kota. Di samping itu struktur

perekonomian antara daerah pedesaan yang berbeda dengan daerah kota di mana pada daerah pedesaan kegiatan ekonomi lebih bersifat informal dan di kota lebih kearahh formal, sehingga kegiatan memasuki pasar kerja akan lebih mudah terjadi pada daerah pedesaan, tanpa harus memenuhi suatu kualitas manusia tinggi (Zainab Bakir dan Chris Manning, 1984).

Di atas telah disinggung, bahwa volume angkatan kerja lebih besar dibanding dengan volume angkatan kerja pria. Rendahnya persentase angkatan kerja perempuan ini dapat dimaklumi karena masih besarnya penduduk perempuan yang mempunyai kegiatan mengurus rumahtangga. Jumlah wanita di kota yang mengurus rumahtangga terdapat 47,61 persen pada tahun 1980 dan sebesar 44,14 persen pada tahun 1990. Sementara itu, jumlah wanita di daerah pedesaan yang mengurus rumahtangga bergerak dari 49,44 persen pada tahun 1980 ke 46,73 persen pada tahun 1990.

Menurut kelompok umur, persentase angkatan kerja terbesar baik di daerah kota maupun di pedesaan dicapai pada usia 25-29 tahun bagi laki-laki dengan memberikan kontribusi lebih dari 15 persen (pada tahun 1990). Sementara itu, perempuan di kota menyumbang persentase angkatan kerja tertinggi pada usia 20-24 tahun sebesar hampir 15 persen, dan pada usia 25-29 tahun di daerah pedesaan dengan sumbangan sebesar 12,61 persen.

Tabel 5.2.3 : Persentase Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Daerah Tahun 1980 dan 1990.

Umur	Kota		Pedesaan				Kota+Pedesaan					
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan		
10-14	0,98	1,22	3,07	3,41	2,98	2,77	4,27	4,02	2,60	2,26	2,06	3,82
15-19	7,61	8,02	16,20	18,37	9,54	10,52	12,33	12,36	9,17	9,70	12,99	14,32
20-24	16,44	15,80	17,97	20,64	12,48	12,06	12,78	11,96	13,24	13,29	13,66	14,79
25-29	17,94	16,78	13,19	14,99	15,07	14,19	11,91	12,61	15,61	15,04	12,13	13,38
30-34	12,09	15,47	9,06	11,20	11,26	12,68	9,91	11,33	11,42	13,59	9,76	11,28
35-39	12,53	13,23	9,47	9,07	12,10	12,00	11,40	10,64	12,18	12,40	11,07	10,37
40-44	10,59	8,36	9,53	6,16	10,09	8,42	10,63	8,69	10,18	8,40	10,44	7,86
45-49	7,11	7,48	7,46	5,31	7,93	7,75	8,87	8,57	7,18	7,66	8,63	7,51
50-54	6,34	5,70	6,39	4,44	7,19	6,65	7,66	7,30	7,02	6,34	7,45	6,37
55-59	3,30	3,05	3,20	2,62	3,80	4,19	3,94	4,79	3,72	3,81	3,82	4,09
60-64	2,58	2,44	2,46	2,02	3,90	4,20	3,52	4,21	3,65	3,62	3,34	3,50
65+	2,30	2,43	1,92	1,77	3,58	4,59	2,71	3,52	3,35	3,88	2,58	2,95
Jumlah	setiap kolom berjumlah 100,00											

Sumber : 1. BPS (1983a) 2. BPS (1992)

Penghitungan tingkat partisipasi angkatan kerja kasar ini sangat dipengaruhi oleh penduduk yang berumur 10 tahun kebawah oleh karena itu pengaruh tersebut dapat dihilangkan dengan tidak mengikutsertakan kepada penduduk yang kurang umurnya

10 tahun, sehingga akan mendapatkan tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai berikut.

Tabel 5.2.4 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Ketergantungan Ekonomi menurut Jenis Kelamin, daerah 1980 dan 1990. (%)

Jenis Indikator	Tahun	Kota			Desa			Kota+Desa		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kasar	1980	41,26	14,02	27,68	47,26	18,25	32,66	45,99	17,37	31,61
	1990	49,25	21,01	35,20	53,43	22,82	38,07	51,88	22,20	37,08
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	1980	57,82	19,36	38,50	69,14	26,19	47,32	66,66	24,72	45,41
	1990	65,02	27,41	46,19	72,86	30,72	51,65	70,09	29,56	49,72
3. Tingkat Ketergantungan Ekonomi	1980	-	-	261,21	-	-	206,18	-	-	216,31
	1990	-	-	184,12	-	-	162,69	-	-	169,71

Sumber : 1. BPS (1983a)  
2. BPS (1992)

Di daerah kota dan pedesaan dari 45,41 persen (1980) menjadi 49,72 persen (1990) dengan perincian laki-laki dari 66,66 persen (1980) naik menjadi 70,04 persen (1990) demikian halnya perempuan naik dari 24,72 persen (1980) menjadi 29,56 persen (1990).

Di daerah kota untuk laki-laki mengalami kenaikan dari 57,82 persen (1980) menjadi 65,02 persen (1990) dan perempuan dari 19,36 persen (1980) menjadi 27,41 persen (1990). Sedangkan daerah pedesaan juga terjadi hal yang sama yaitu naik, laki-laki dari 69,14 persen (1980) menjadi 72,86 persen (1990) dan

perempuan dari 26,19 persen (1980) menjadi 30,72 persen (1990)

Pengukuran tingkat ketergantungan ekonomi diperoleh dari penduduk yang tidak aktif secara ekonomi dibandingkan terhadap penduduk yang aktif secara ekonomi. Selama periode 1980-1990 telah terjadi penurunan yang cukup berarti yaitu dari 216,31 persen menjadi 169,71 persen, demikian terjadi pada daerah kota yakni dari 261,21 persen menjadi 184,18 persen dan daerah pedesaan dari 206,18 persen menjadi 162,69 persen. Tingkat penurunan Ketergantungan penduduk yang tidak aktif ini lebih cepat turun untuk daerah kota dibanding daerah pedesaan, hal ini berarti beban penduduk aktif secara ekonomi di daerah kota akan mempunyai suatu kecenderungan yang lebih ringan didalam memikul beban dari penduduk yang tidak aktif untuk masa-masa yang akan datang.

Tabel 5.2.5 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang dibedakan umur, jenis kelamin dan daerah selama 1971 - 1990. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dihitung dari jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas. TPAK ini dipengaruhi oleh berbagai faktor demografi, sosial dan ekonomi, dimana faktor tersebut diantaranya adalah umur, status perkawinan, tingkat pendidikan dan daerah.

Tabel 5.2.5 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  
menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin  
dan daerah 1971, 1980 dan 1990.

Kelompok Umur	Kota			Pedesaan			Kota+Pedesaan		
	1971	1980	1990	1971	1980	1990	1971	1980	1990
1. Laki-laki	58,7	57,8	68,3	65,0	69,1	72,9	67,1	66,7	70,1
10 - 14	8,1	3,3	5,0	16,5	11,5	11,7	15,4	9,8	9,4
15 - 19	32,4	26,9	34,6	55,4	51,5	56,4	51,6	45,0	48,2
20 - 24	64,4	65,4	73,3	80,5	82,5	85,7	77,6	77,7	80,4
25 - 29	85,4	87,5	91,0	88,0	92,2	95,6	87,6	91,1	93,9
30 - 34	94,5	92,4	96,2	89,7	93,8	97,2	90,3	93,5	96,8
35 - 39	94,0	94,4	96,7	90,1	94,0	97,4	90,5	94,1	97,1
40 - 44	92,1	93,0	96,2	89,6	93,7	97,0	89,9	93,6	96,8
45 - 49	85,5	90,5	95,5	88,6	93,0	96,2	88,3	92,5	95,8
50 - 54	79,5	79,1	88,7	85,8	89,2	94,2	85,0	87,3	92,5
55 - 59	67,3	65,7	76,1	82,2	85,5	91,0	80,2	81,3	86,6
60 - 64	48,6	57,6	61,4	75,6	78,6	84,9	73,6	74,9	78,2
65 +	40,1	39,9	43,2	70,9	55,6	63,4	68,2	52,8	57,8
2. Perempuan	19,3	19,4	27,4	27,9	26,2	30,7	26,9	24,7	29,6
10 - 14	7,8	3,6	6,1	11,4	7,1	7,7	10,9	6,3	7,2
15 - 19	17,3	18,3	31,3	25,5	24,2	29,8	24,2	22,7	30,4
20 - 24	20,9	23,3	38,5	26,0	24,9	30,4	26,2	24,5	33,6
25 - 29	21,3	23,3	32,7	29,6	27,9	33,0	28,7	26,9	32,9
30 - 34	24,6	24,1	30,8	32,3	27,9	36,5	31,4	30,1	34,4
35 - 39	25,7	24,2	32,2	34,8	34,2	40,0	33,7	32,3	37,4
40 - 44	28,2	29,2	32,3	38,4	37,2	42,7	37,4	36,0	39,4
45 - 49	25,6	27,9	30,9	38,7	40,0	44,8	37,1	37,6	40,6
50 - 54	25,7	27,1	30,0	36,8	37,8	43,7	35,5	35,8	39,6
55 - 59	18,6	22,2	24,6	35,1	35,4	42,5	32,8	32,6	36,9
60 - 64	20,7	17,9	20,5	29,6	28,5	35,6	28,6	26,6	31,2
65 +	18,6	9,7	12,0	25,5	15,9	20,1	24,6	14,8	17,8

Sumber : 1. BPS (1983a)  
2. BPS (1992)

Pola dan perkembangan TPAK laki-laki di Jawa Barat selama periode 1971-1990 menunjukkan hal yang berbeda terhadap TPAK perempuan, yang mana TPAK laki-laki lebih tinggi baik itu di daerah kota maupun di daerah pedesaan. Berdasarkan struktur umur, untuk umur 10-29 tahun selama periode 1971-1990 TPAK laki-laki di daerah kota lebih rendah jika dibandingkan dengan TPAK di daerah pedesaan, perbedaan yang menyebabkan rendahnya TPAK laki-laki di daerah kota tersebut karena terjadi peningkatan fasilitas pendidikan dan perbaikan dibidang ekonomi yang berbeda antara daerah kota dan daerah pedesaan. TPAK laki-laki ini dilihat dari terendah dan tertinggi selama periode 1971-1990 tidak terjadi sesuatu pergeseran, yang mana terendah tetap saja ada pada laki-laki dengan umur 10-14 tahun dan tertinggi ada pada umur 35 - 39 tahun. Sehingga perbedaan dari struktur umur penduduk laki-laki nampak tidak terlalu berpengaruh terhadap TPAK-nya.

TPAK penduduk perempuan di Jawa Barat selama periode 1971-1990 ternyata menunjukkan lebih tinggi di pedesaan dari pada di kota. Rendahnya partisipasi penduduk perempuan didalam angkatan kerja di daerah kota tidak hanya disebabkan masih terbatasnya lapangan pekerjaan disektor non pertanian, tetapi juga karena sifat dari pekerjaan di kota yang umumnya mengharuskan perempuan meninggalkan rumah. Hal ini menimbulkan konflik antara tugas kaum perempuan sebagai istreri dan ibu

rumah tangga disatu pihak dan tugasnya sebagai pekerja dilain pihak. Sebaliknya, dipedesaan kebanyakan perempuan bekerja dipertanian keluarga dan tidak perlu bekerja di luar lingkungan keluarga atau dalam lingkungan yang asing bagi suami mereka tugas rumah tangga juga dapat dilakukan bersama-sama dengan pekerjaan mereka (Dollar Buket dan Zainab Bakir, 1983).

TPAK perempuan selama periode 1971-1990 di daerah kota terjadi perubahan yang cukup berarti pada umur 20-24 tahun selama periode 1980-1990, walaupun demikian pola kenaikan telah terjadi di hampir setiap kelompok umur selama periode 1980-1990.

Mengamati pola dan perkembangan TPAK di Jawa Barat, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 5.2.6, dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan, menunjukkan suatu pola dimana mulai dari yang belum/tidak pernah sekolah hingga kelompok penduduk yang menamatkan Universitas berbentuk menyerupai huruf U dengan titik terendah pada tingkat pendidikan SLTP Umum.

Tabel 5.2.6 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin, Pendidikan Tertinggi yang di tamatkan dan Daerah 1980 dan 1990

Pendidikan Tertinggi Yg ditamatkan	Tahun	Kota			Pedesaan			Kota+Pedesaan		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1. Blm/Tdk Pernah Sekolah	1980	68,86	23,37	36,37	78,94	30,34	47,42	78,16	29,55	46,27
	1990	71,80	23,60	37,41	81,60	31,75	48,36	79,94	30,10	46,25
2. Blm/Tdk Tamat Sekolah Dasar	1980	48,36	15,81	31,42	62,21	22,26	44,01	59,72	21,00	41,33
	1990	49,42	19,11	33,42	63,22	26,22	44,79	59,75	24,26	41,80
3. Sekolah Dasar	1980	61,27	16,94	39,94	74,20	26,02	52,90	70,92	23,44	49,44
	1990	65,79	26,21	45,36	78,96	33,83	57,79	75,02	31,23	53,82
4. SLTP Umum	1980	49,73	15,33	34,16	59,30	16,71	44,42	54,16	15,82	38,40
	1990	57,60	24,24	41,71	64,45	23,99	48,60	60,44	24,16	44,32
5. SLTP Kejuruan	1980	68,28	19,49	49,62	72,11	21,96	56,68	70,27	20,57	53,09
	1990	70,57	23,65	50,71	73,46	27,90	56,30	71,82	25,29	53,02
6. SLTA Umum	1980	62,42	26,76	50,39	77,78	34,28	65,40	67,26	28,74	54,85
	1990	73,95	37,78	59,56	81,49	40,05	68,23	75,90	38,23	61,60
7. SLTA Kejuruan	1980	79,84	53,35	69,88	86,56	65,03	80,46	83,32	58,17	74,79
	1990	88,66	57,57	76,08	90,69	67,44	82,83	89,42	60,63	78,44
8. Diploma I/II	1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1990	88,02	65,06	77,66	91,48	75,45	86,62	88,98	66,81	77,74
9. Akademi	1980	86,80	52,54	77,50	87,48	47,67	79,28	86,99	51,47	77,98-
	1990	90,24	62,57	80,36	89,07	70,13	84,21	90,03	63,45	80,95
10. Universitas	1980	92,04	61,39	84,77	91,80	47,84	82,01	91,98	58,44	84,14
	1990	93,30	74,33	87,58	91,78	59,36	83,74	93,08	72,60	87,05

Sumber : 1. BPS (1974)  
2. BPS (1983a)  
3. BPS (1992)

Ternyata selama kurun 1980-1990 pola dan perkembangan TPAK masih saja tetap sama dengan mempunyai kolerasi positif, sesudah tingkat pendidikan SLTP. Untuk sekolah kejuruan dan umum baik SLTP maupun SLTA tampak bahwa tingkat partisipasi angkatan

kerja dari kejuruan akan lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan penduduk yang mempunyai pendidikan kejuruan lebih siap memasuki kesempatan kerja yang ada. TPAK di Jawa Baratpun dalam waktu 10 tahun terakhir telah menunjukkan pola yang menarik untuk seluruh jenjang pendidikan yang sama. Naiknya TPAK ini sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang cukup tinggi sehingga dapat menyediakan kesempatan kerja lebih baik. Lebih lanjut Tabel 5.2.6 telah menerangkan bahwa TPAK bagi mereka telah yang menamatkan pendidikan universitas mempunyai nilai yang paling tinggi, karena kesempatan kerja bagi mereka akan lebih banyak dan terbuka.

### 5.3. Penduduk Yang Bekerja.

Pengertian bekerja menurut sensus penduduk adalah mereka yang selama seminggu yang lalu melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mereka yang melakukan kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang digunakan sendiri tidak dimaksud bekerja.

Tabel 5.3.1 : Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah  
Tahun 1971, 1980 dan 1990.

Jenis Kelamin	Tahun	Kota	Pedesaan	Kota+Pedesaan
Laki-laki	1971	453252	3684163	4137415
	1980	1161243	5016243	6177486
	1990	2854739	6013042	8867781
Perempuan	1971	126163	1451922	1578085
	1980	391416	1932041	2323457
	1990	1187103	2519232	3706375
Laki-laki+Perempuan	1971	579415	5136085	5715500
	1980	1552639	6948284	8500943
	1990	4041842	8532274	12574116

Sumber : 1. BPS (1983a)  
2. BPS (1992)

Tabel 5.3.1 menunjukkan bahwa pada tahun 1971 ada sebanyak 5.715.500 penduduk yang bekerja (89,86 persen diantaranya di pedesaan), kemudian pada tahun 1980 naik menjadi 8.500.943 orang (81,74 persen diantaranya di pedesaan). Pada tahun 1990 jumlah pekerja ini melonjak menjadi 12.574.116 orang (67,86 persen diantaranya di pedesaan). . Meningkatnya jumlah pekerja dari tahun ke tahun menunjukkan semakin banyaknya kesempatan kerja yang diciptakan. Keadaan demikian diduga berkaitan dengan membaiknya situasi perekonomian Jawa Barat. Tetapi, menurunnya persentase pekerja di pedesaan memberikan indikasi bahwa kesempatan kerja yang tidak tersedia di daerah ini tidak sebanding dengan

meningkatnya permintaan tenaga kerja. Bisa juga diantara para pencari kerja di pedesaan justru memperoleh pekerjaan di kota, misalnya di dalam sektor informal.

Mengenai tenaga kerja per lapangan pekerjaan, penduduk yang bekerja di sektor pertanian secara absolut masih tinggi dan cenderung meningkat. Pada tahun 1980 terdapat 4.062.242 orang dan pada tahun 1990 meningkat menjadi 4.630.405 orang. Namun, secara relatif justru menunjukkan penurunan, yaitu dari 48,22 persen pada tahun 1980 menjadi 37,15 persen pada tahun 1990.

Kecuali Jasa Kemasyarakatan, sektor-sektor lain memperlihatkan kenaikan. Persentase kenaikan tertinggi terjadi pada sektor listrik, gas dan air yaitu 0,14 persen. Pergeseran peranan dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian sejalan dengan arah pembangunan ekonomi di Propinsi Jawa Barat.

Tabel 5.3.2: Persentase Penduduk yang Bekerja selama Seminggu yang lalu menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 1980 dan 1990.

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Tahun	A	M	S	%	(Jumlah)
01. Tdk Pernah Sekolah	1980	63,87	11,05	25,08	100,00	2191923
	1990	58,97	14,23	26,80	100,00	1634587
02. Tdk/Blm Tamat SD	1980	53,04	15,94	31,02	100,00	3362331
	1990	48,22	20,27	31,51	100,00	3516364
03. Sekolah Dasar	1980	40,48	18,71	40,81	100,00	2085693
	1990	38,75	24,65	36,60	100,00	4715284
04. SMTP Umum	1980	10,90	24,99	64,11	100,00	278640
	1990	11,64	37,20	51,16	100,00	909996
05. SMTP Kejuruan	1980	11,62	20,86	67,52	100,00	87392
	1990	11,37	28,95	59,68	100,00	94242
06. SLTA Umum	1980	7,64	20,41	71,95	100,00	182132
	1990	5,05	31,89	63,06	100,00	753677
07. SLTA Kejuruan	1980	4,93	14,66	80,41	100,00	255023
	1990	3,85	27,14	69,01	100,00	668279
08. Diploma I/II	1980	-	-	-	-	-
	1990	1,15	13,33	85,52	100,00	48869
09. Akademi/DIII	1980	3,99	13,90	82,11	100,00	29556
	1990	1,41	19,22	79,37	100,00	97150
10. Universitas	1980	5,64	11,27	83,09	100,00	26282
	1990	2,49	18,36	79,15	-	-
11. Tak Terjawab	1980	33,76	19,15	42,91	100,00	1967
	1990	39,26	37,78	22,96	100,00	13528
Jumlah	1980	48,22	15,73	36,05	100,00	8500943
	1990	37,15	23,43	39,42	100,00	12574116

Sumber: 1. BPS (1983a)  
2. BPS (1992)

Tabel 5.3.2 menunjukkan pembagian lapangan usaha versi Kuznets (1966). Dia mengelompokkan lapangan usaha tersebut ke

dalam tiga sektor primer, yaitu Sektor A (agriculture atau pertanian), sektor M (manufacture) dan sektor S (service). Sektor-sektor yang termasuk ke dalam sektor M yakni pertambangan; industri, listrik dan air minum; dan bangunan. Sedangkan sektor-sektor angkutan, perdagangan, keuangan dan jasa kemasyarakatan tercakup dalam sektor S. Walaupun sektor pertanian masih dominan di Jawa Barat tetapi peranannya menunjukkan penurunan. Sementara itu, di Jawa Barat telah terjadi pergeseran peran dari sektor A ke sektor M dan sektor S. Pergeseran tersebut menandakan bahwa pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan telah memberikan hasil.

Mayoritas pekerja yang tidak pernah sekolah berada di sektor A, yakni 63,87 persen pada tahun 1980 dan 58,97 persen pada tahun 1990. Juga mereka yang tidak/belum tamat Sekolah Dasar persentasenya masih relatif tinggi. Jumlah pekerja dengan pendidikan rendah di sektor M tidak terlalu banyak, walaupun memperlihatkan kenaikan. Seperti halnya dengan sektor M, sektor S nampaknya lebih membutuhkan pekerja dengan pendidikan menengah ke atas. Kontradiksi dengan sektor M, peranan sektor S dalam periode 1980-1990 mengalami penurunan.

Dilihat dari status pekerjaan, pekerja keluarga memberikan persentase yang paling tinggi, yakni 71,49 persen pada tahun 1980 dan 70,91 pada tahun 1990. Di sektor M, pekerja dengan status

buruh/karyawan memiliki persentase yang paling tinggi, yaitu 26,93 persen pada tahun 1980 dan 41,38 persen pada tahun 1990. Sedangkan di sektor S, mereka yang berstatus berusaha sendiri (tanpa bantuan orang lain) menyajikan persentase yang yang terbesar, yaitu 49,15 persen pada tahun 1980 dan 65,77 persen pada tahun 1990. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 5.3.3.

Tabel 5.3.3: Persentase Penduduk yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 1980 dan 1990.

Status Pekerjaan	A		H		S		% Jumlah	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990	1980	1990
1. Berusaha Sendiri Tanpa Bantuan Orang Lain	40,92	25,86	9,93	8,37	49,15	65,77	100,00 (2345102)	100,00 (2593156)
2. Berusaha dengan Dibantu ART/Buruh Tidak Tetap	64,17	61,27	10,41	9,51	25,42	29,22	100,00 (2115686)	100,00 (2878370)
3. Berusaha Dengan Buruh Tetap	27,78	30,80	29,69	33,10	42,53	36,10	100,00 (244355)	100,00 (213844)
4. Buruh/Karyawan	34,97	20,97	26,93	41,38	38,10	37,65	100,00 (2646775)	100,00 (1469858)
5. Pekerja Keluarga	71,49	70,91	7,76	9,40	20,75	19,69	100,00 (1040284)	100,00 (1469858)
6. Tak Terjawab	41,16	23,94	17,12	31,21	41,72	44,85	100,00 (108741)	100,00 (13273)
%	48,22	37,15	15,73	23,43	36,05	39,42	100,00 (8500943)	100,00 (12574116)

Sumber : 1. BPS (1983a) 2. BPS (19920

Persentase penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan, seperti ditunjukkan oleh Tabel 5.3.4, telah pula memperlihatkan pergeseran-pergeseran. Untuk tenaga usaha pertanian mengalami penurunan sekitar 11,40 persen dari 48,50 persen pada tahun 1980 menjadi 37,10 persen pada tahun 1990.

Tabel 5.3.4: Persentase Penduduk Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jenis Pekerjaan Utama, Tahun 1980 dan 1990

Jenis Pekerjaan Utama	1980		1990		Perubahan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1. Tenaga Profesional, Tehnisi dan yang Sejenis	252362	3,00	445475	3,57	193113	0,57
2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	8409	0,10	27302	0,22	18893	0,12
3. Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenisnya	286642	3,41	660916	5,30	374274	1,89
4. Tenaga Usaha Penjualan	1360089	16,16	2308019	18,50	947930	2,34
5. Tenaga Usaha Jasa	366655	4,36	566919	4,55	200264	0,19
6. Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	4082260	8,50	4627996	37,10	545736	-11,40
7. Tenaga Produksi, Operator Alat Angkutan, Pekerja Kasar	1977267	23,49	3825937	30,67	1848370	7,18
8. Lainnya	83612	0,99	10140	0,08	-73472	-0,91
9. Tak Terjawab	83647	-	101412	-	-17765	-
Jumlah	8500943	100,00	12574116	100,00	4073173	-

Sumber : 1. BPS (1983a) 2. BPS (1992)

Untuk pekerja yang tergolong "Blue Collar" masih tergolong cukup tinggi persentase kenaikannya dibandingkan dengan pekerja yang tergolong "White Collar". Rendahnya pertumbuhan dalam White Collar ini diperkirakan erat kaitannya dengan masalah kualitas tenaga kerja, terutama masih rendahnya tingkat pendidikan.

#### 5.4 Pengangguran.

Selain dari Sensus Penduduk, angka pengangguran dapat pula diperoleh dari berbagai sumber data yang lain. Sejak tahun 1976 (Daldjoeni, 1986: 41) Biro Pusat Statistik melancarkan suatu survei angkatan kerja nasional yang operasinya secara triwulanan. Studinya selain mengukur tingkat pengangguran dan setengah pengangguran, juga bertalian dengan keadaan angkatan kerja, kesempatan kerja, dan hubungan pengangguran dengan kehidupan rumah tangga.

Mereka yang sedang berusaha memperoleh pekerjaan digolongkan ke dalam pengangguran terbuka. Persentase tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat selama periode 1980-1990 mengalami kenaikan dari 2,04 persen pada tahun 1980 menjadi 4,15 pada tahun 1990 (Tabel 5.4.1). Tingkat pengangguran terbuka di kota lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan.

Tabel 5.4.1: Persentase Tingkat Pengangguran, Terbuka Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990

Jenis Kelamin	Kota		Pedesaan		Kota + Pedesaan	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
1. Laki-laki	2,76	5,49	1,45	2,71	1,70	3,62
2. Perempuan	2,99	7,03	2,93	4,59	2,94	5,38
Jumlah	2,82	5,95	1,87	3,27	2,04	4,15

Sumber : 1. BPS (1983a)  
2. BPS (1992)

Menurut jenis kelamin, selama kurun waktu 1980-1990 baik di kota maupun di pedesaan, pengangguran perempuan memperlihatkan persentase yang lebih besar. Kemungkinan pencari kerja perempuan mengalami kesulitan bersaing di dalam mengisi lowongan kerja yang ada. Bisa juga karena sifat pekerjaannya, lapangan kerja yang membutuhkan tenaga kerja wanita relatif lebih kecil.

Apabila dihubungkan dengan tingkat pendidikan pencari kerja, lulusan sekolah menengah ke atas relatif lebih sulit mengisi kesempatan kerja. Hal ini diperlihatkan oleh Tabel 5.4.2.

Tabel 5.4.2: Persentase Tingkat Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi  
Yang Ditamatkan Jenis Kelamin dan Daerah  
Tahun 1980 dan 1990

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Tahun	Kota			Pedesaan			Kota + Pedesaan		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1. Tidak/Belum Pernah Sekolah	1980	1,00	0,94	0,98	1,18	3,31	2,06	1,17	3,10	1,98
	1990	1,75	1,20	1,50	1,27	2,57	1,84	1,34	2,35	1,79
2. Tidak/Belum Tamat SD	1980	2,17	2,08	2,15	1,28	2,60	1,60	1,40	2,53	1,67
	1990	3,37	4,04	3,57	1,73	3,20	2,16	2,08	3,38	2,46
3. Sekolah Dasar	1980	2,58	2,86	2,64	1,57	2,45	1,76	1,79	2,54	1,95
	1990	4,35	5,80	4,78	2,73	5,27	3,46	3,16	5,49	3,81
4. SMTP Umum	1980	3,50	4,94	3,79	3,50	4,63	3,65	3,50	4,82	3,72
	1990	6,40	8,60	7,01	6,05	11,60	7,13	6,25	9,59	7,06
5. SMTP Kejuruan	1980	3,55	5,46	3,84	1,75	2,37	1,78	2,59	4,01	2,78
	1990	3,62	6,71	4,23	3,70	10,34	4,94	3,66	8,25	4,54
6. SMTA Umum	1980	4,51	8,25	5,18	4,09	6,77	4,49	4,36	7,78	4,92
	1990	10,08	14,79	11,27	10,13	19,69	11,93	10,10	15,81	11,44
7. SMTA Kejuruan	1980	4,84	5,85	5,13	2,76	3,74	2,99	3,72	4,87	4,02
	1990	6,85	8,91	7,48	5,55	9,40	6,61	6,36	9,08	7,16
8. Diploma I/II	1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1990	4,44	7,63	5,64	1,82	10,70	4,17	3,69	8,22	5,27
9. Akademi	1980	1,38	3,10	1,69	1,09	-	0,96	1,29	2,47	1,49
	1990	3,92	8,73	5,26	3,49	6,69	4,17	3,84	8,47	5,08
10. Universitas	1980	1,33	2,33	1,50	1,50	2,33	1,61	1,37	2,33	1,52
	1990	4,90	8,90	5,92	6,17	8,00	6,50	5,08	8,81	6,00
Jumlah	1980	2,70	2,99	2,82	2,93	2,93	1,87	1,70	2,94	2,04
	1990	5,48	7,03	5,95	2,71	4,59	3,27	3,62	5,38	4,15

Sumber : 1. BPS (1983a)  
2. BPS (1992)

Pengangguran terbuka paling banyak dialami oleh mereka yang berpendidikan SMTA, terutama perempuan. Sementara itu penganggur yang tidak berpendidikan memberikan persentase yang tidak besar. Penyebabnya diduga karena sebagian besar penduduk

perempuan Jawa Barat memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Mereka nampaknya tidak memiliki banyak alternatif dalam perolehan pekerjaan; biasanya mereka memasuki lapangan pertanian atau sebagai pembantu rumahtangga.

Dengan batas 35 jam seminggu, maka mereka yang bekerja kurang dari batas ini dikatakan sebagai pekerja yang kurang optimal dan mereka disebut sebagai setengah penganggur. Setengah pengangguran di Jawa Barat mengalami penurunan, di mana pada tahun 1980 terdapat 37,51 persen dan kemudian turun menjadi 30,90 persen pada tahun 1990. Turunnya tingkat setengah pengangguran ini erat kaitannya dengan perbaikan tingkat pengupahan, dan jenis pekerjaan dari orang-orang yang bekerja.

## BAB.VI. PERUMAHAN DAN LAHAN PERTANIAN

### 6.1. Pendahuluan

Kebutuhan perumahan merupakan kebutuhan primer yang dirasakan sangat mendesak. Perumahan sendiri merupakan superstruktur yang mencakup berbagai bentuk rumah, ukuran, tipe serta bahan yang digunakan untuk membangunnya. Faktor-faktor perumahan tersebut bertalian dengan keamanan, ketenangan pribadi dan sekaligus perlindungan keluarga di dalam hidup bermasyarakat (Daldjoeni, 1980: 235).

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan rumahtangga, kebutuhan akan sarana tempat tinggalpun semakin meningkat. Tercatat dalam Tabel 6.1.1 bahwa banyaknya rumahtangga di Jawa Barat terus meningkat dari 4.797.249 rumahtangga pada tahun 1971 menjadi 6.100.713 rumahtangga pada tahun 1980 dan pada tahun 1990 telah mencapai 8.179.898 rumahtangga. Dengan demikian, dalam kurun waktu 1980-1990 telah terjadi pertambahan sebanyak 2.079.185 rumahtangga atau 207.919 rumahtangga per tahun. Dengan asumsi bahwa setiap rumahtangga memerlukan satu buah rumah, maka kebutuhan akan sarana tempat tinggal tersebut diperkirakan sebanyak 207.919 unit ditambah dengan tunggakan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 6.1.1: Jumlah Rumah tangga dan Laju Pertumbuhan Rumah tangga menurut Kabupaten/Kotamadya Tahun 1971-1980 dan 1980-1990

Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Rumah tangga		1971	Laju Pertumbuhan Rumah tangga	
	1990	1980		71-80	80-90
01.Kab.Pandeglang	186250	144117	112640	1,79	2,60
02.Kab.Lebak	189815	145394	118223	2,30	2,70
04.Kab.Bogor	779770	517146	349636	4,39	4,19
05.Kab.Sukabumi	461274	352107	269522	2,98	2,74
06.Kab.Cianjur	414692	325759	253849	2,78	2,44
07.Kab.Bandung	733023	578893	431480	3,28	2,39
07.Kab.Garut	395386	319152	262343	2,18	2,17
08.Kab.Tasikmayala	448146	365493	296227	2,34	2,06
09.Kab.Ciamis	414477	356047	303293	1,78	1,53
10.Kab.Kuningan	204706	172184	149661	1,55	1,75
11.Kab.Cirebon	367743	291350	245819	1,88	2,36
12.Kab.Majalengka	273875	222531	190962	1,69	2,10
13.Kab.Sumedang	227185	185208	158696	1,71	2,06
14.Kab.Indramayu	365364	298433	234863	2,67	2,04
15.Kab.Subang	324305	265536	214373	2,38	2,02
16.Kab.Purwakarta	135640	105749	83871	2,58	2,52
17.Kab.Karawang	366187	289956	229707	2,59	2,36
18.Kab.Bekasi	456745	240863	171639	3,79	6,61
19.Kab.Tangerang	564499	306762	208761	4,32	6,29
20.Kab.Serang	301689	231022	187457	2,32	2,70
21.Kod.Bogor	54249	46130	35782	2,77	1,63
22.Kod.Sukabumi	28348	22208	18925	1,77	2,47
23.Kod.Bandung	433108	274401	224047	2,25	4,67
24.Kod.Cirebon	53422	44272	35273	2,53	1,80
Jawa Barat	81798989	6100713	4797249	2,68	2,97

Sumber : BPS (1991b)

Pada kenyataannya, distribusi pembangunan perumahan tidak selalu sebanding dengan pertambahan rumah tangga. Sebagai contoh, tingginya laju pertumbuhan rumah tangga di kawasan Botabek diimbangi dengan banyaknya pembangunan kompleks-komplek pemukiman.

Namun di lain pihak, banyaknya unit rumah yang dibangun di kabupaten-kabupaten Lebak, Pandeglang dan Sumedang (di mana penambahan rumahtangganya hampir seimbang) belum tentu proporsional.

Rumah sehat tidak selalu harus dicirikan oleh fasilitas rumahtangga saja, melainkan juga memperhatikan aspek kesehatan lingkungan. Secara deskriptif dapat dikatakan bahwa fasilitas lingkungan dari suatu rumah dapat mempengaruhi kesehatan penghuninya, terutama bayi dan anak-anak. Pada akhirnya, ini semua akan mempengaruhi angka kematian bayi (AKB).

Menggunakan data Sensus Penduduk 1990 (Tabel 6.1.2), terlihat adanya hubungan negatif antara kedua peubah tersebut (AKB dan fasilitas rumah). Semakin baik fasilitas rumah tangga (TV dan luas lantai) dan fasilitas lingkungan (air minum, air mandi dan kakus) menyebabkan semakin rendahnya AKB.

Tabel 6.1.2 : Hubungan antara Angka Kematian Bayi dan Fasilitas Rumah tangga Tahun 1990

Daerah	AKB	Fasilitas Rumah tangga (%)				
		Sungai sbg Sumber Air Minum	Sungai sbg Sumber Air Mandi	Selain Kakus	TV	Luas Lantai <40m <sup>2</sup>
Daerah dengan AKB rendah						
1. Kod. Bogor	33,58	0,37	3,23	17,73	66,86	30,06
2. Kod. Bandung	49,78	0,03	0,73	2,41	65,36	48,08
3. Kab. Sumedang	57,74	1,92	4,78	37,54	26,48	44,40
4. Kod. Sukabumi	57,74	0,36	3,74	1,40	61,50	35,91
5. Kab. Kuningan	61,58	0,18	10,40	45,55	26,56	17,88
Rata-rata	52,08	0,57	4,58	20,93	49,35	35,27
Daerah dengan AKB Tinggi						
1. Kab. Pandeglang	98,99	7,78	20,07	68,57	10,03	34,57
2. Kab. Cianjur	100,50	6,25	16,84	33,90	14,00	50,61
3. Kab. Indramayu	103,58	8,15	9,42	61,84	13,40	32,13
4. Kab. Karawang	109,52	3,44	8,19	56,99	20,09	40,09
5. Kab. Serang	123,77	12,36	18,11	67,54	22,92	26,88
Rata-rata	107,27	7,60	14,53	57,77	16,09	36,86

Sumber : 1. BPS (1992)  
2. Tabel 3.3.1

## 6.2. Luas Lantai

Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat pula dilihat dari luas lantai rumah yang dihuninya. Dikaitkan dengan banyaknya anggota rumah tangga, hal ini akan mencerminkan kesehatan

rumahtangga tersebut. Membandingkan kedua hasil sensus penduduk (SP'80 dan SP'90), terlihat adanya penurunan persentase rumahtangga dengan luas lantai kurang dari 40 m<sup>2</sup>, yaitu dari 51,22 per sen pada tahun 1980 menjadi 41,00 per sen. Pergeseran persentase ini diduga ada hubungannya dengan semakin baiknya pendapatan masyarakat dan semakin tersedianya rumah-rumah sehat yang bisa dibeli oleh masyarakat. Keadaan serupa terjadi baik di kota maupun di pedesaan.

Tabel 6.2.1: Persentase Rumah tangga menurut Kabupaten/  
dan Luas Lantai (m<sup>2</sup>)  
Tahun 1990

Kabupaten/ Kotamadya	<20	20 29	30 39	40 49	50 69	70 99	100 149	150 199	200 299	Jumlah	
										300+	
<b>Kabupaten:</b>											
Pandeglang	4,13	13,99	16,45	20,56	22,93	16,76	3,81	0,67	0,30	0,42	100,00
Lebak	6,25	18,65	22,40	21,26	18,37	99,84	9,84	2,48	0,29	0,15	100,00
Bogor	7,97	11,22	16,35	18,72	22,47	14,44	5,95	1,61	0,79	0,48	100,00
Sukabumi	11,26	24,33	21,15	18,87	14,24	6,61	1,86	0,51	0,40	0,73	100,00
Cianjur	7,96	21,60	21,05	18,80	18,00	8,55	2,36	0,55	0,37	0,76	100,00
Bandung	10,43	23,65	21,69	15,72	13,11	9,67	3,79	0,91	0,58	0,44	100,00
Garut	9,41	25,12	28,97	16,72	10,89	6,02	2,14	0,35	0,20	0,19	100,00
Tasikmayala	7,94	22,49	24,32	28,48	14,27	8,09	3,12	0,59	0,32	0,34	100,00
Ciamis	3,14	12,33	16,79	21,78	25,81	14,48	4,34	0,63	0,36	0,34	100,00
Kuningan	1,49	5,83	10,56	18,63	35,38	21,69	4,69	0,64	0,55	0,54	100,00
Cirebon	3,57	11,13	15,54	17,93	28,83	15,96	4,95	1,40	0,45	0,26	100,00
Majalengka	3,20	10,50	18,61	21,42	27,66	13,88	3,50	0,69	0,30	0,27	100,00
Sumedang	40,04	16,03	24,33	21,16	17,62	11,33	5,61	0,82	0,35	0,69	100,00
Indramayu	5,53	11,53	15,07	21,15	24,43	15,70	4,50	1,14	0,52	0,43	100,00
Subang	6,52	13,77	22,23	23,18	19,72	10,87	2,61	0,65	0,23	0,21	100,00
Purwakarta	5,42	14,80	18,20	20,09	19,82	14,01	4,47	0,76	0,80	1,63	100,00
Karawang	4,99	13,46	21,64	25,46	18,29	10,20	3,12	0,79	0,58	1,47	100,00
Bekasi	5,13	9,66	12,71	19,22	24,81	17,77	7,32	1,65	0,90	0,82	100,00
Tangerang	8,90	9,35	11,16	11,88	24,12	18,42	7,24	2,31	1,20	0,37	100,00
Serang	4,41	9,10	13,37	18,41	23,78	19,83	7,95	1,88	0,80	0,46	100,00
<b>Kotamadya</b>											
Bogor	7,82	9,23	13,01	13,27	16,29	18,39	11,82	3,96	3,43	2,75	100,00
Sukabumi	8,01	14,14	13,76	12,95	18,48	13,83	9,25	4,93	2,75	1,84	100,00
Bandung	21,68	14,28	12,12	11,04	11,36	13,08	8,37	3,13	2,98	1,97	100,00
Cirebon	6,62	7,52	10,83	12,89	22,66	19,09	11,25	4,07	2,81	2,25	100,00
<b>JAWA BARAT</b>											
1980	11,10	20,35	19,77	18,31	17,18	9,18	2,72	0,60	0,38	0,42	100,0
1990	7,59	15,27	18,14	18,73	20,06	12,97	4,68	1,20	0,72	0,63	100,00

Sumber : 1. BPS (1983a)  
2. BPS (1992)

### 6.3 Penggunaan Bahan Bakar

Dengan semakin baiknya jenis bahan bakar yang digunakan dalam suatu rumahtangga dapat diartikan semakin baiknya kondisi rumahtangga tersebut. Selama periode 1980-1990, persentase rumahtangga di Jawa Barat yang menggunakan jenis penerangan dari listrik naik sangat drastis yaitu dari 13,93 persen (1980) menjadi 53,77 persen (1990) (Tabel 6.3.1). Kenaikan ini diimbangi oleh penurunan persentase dalam pemakaian lampu petromak, lampu minyak tanah dan lain-lain:

<https://jabar.bps.go.id>

Tabel 6.3.1: Persentase Rumah tangga menurut Penggunaan Jenis Bahan Bakar untuk Penerangan per Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1980 dan 1990

Kabupaten/ Kotamadya	Listrik	Gas	Petromak	Minyak Tanah	Lain- nya	Jumlah	
01.Kab.Pandeglang	14,22	0,15	4,26	81,23	0,14	100,00	
02.Kab.Lebak	10,26	0,17	7,97	81,21	0,38	100,00	
03.Kab.Bogor	66,70	0,13	4,15	28,96	0,06	100,00	
04.Kab.Sukabumi	36,41	0,20	4,14	58,98	0,27	100,00	
05.Kab.Cianjur	37,13	0,17	5,51	56,84	0,35	100,00	
06.Kab.Bandung	78,37	0,18	3,16	18,08	0,21	100,00	
07.Kab.Garut	52,83	0,13	3,04	43,06	0,94	100,00	
08.Kab.Tasikmayala	48,18	0,12	3,25	56,21	0,25	100,00	
09.Kab.Ciamis	37,15	0,15	2,11	60,39	0,19	100,00	
10.Kab.Kuningan	52,47	0,15	4,61	39,66	0,12	100,00	
11.Kab.Cirebon	61,51	0,19	7,16	30,93	0,20	100,00	
12.Kab.Majalengka	45,15	0,12	7,00	47,39	0,34	100,00	
13.Kab.Sumedang	62,52	0,16	1,77	35,19	0,36	100,00	
14.Kab.Indramayu	22,47	0,18	8,30	68,53	0,52	100,00	
15.Kab.Subang	34,17	0,13	7,56	57,73	0,42	100,00	
16.Kab.Purwakarta	43,68	0,30	4,84	50,96	0,21	100,00	
17.Kab.Karawang	41,13	0,21	6,10	51,73	0,83	100,00	
18.Kab.Bekasi	6,76	0,27	3,21	28,40	0,37	100,00	
19.Kab.Tangerang	73,11	0,26	3,79	22,50	6,28	100,00	
20.Kab.Serang	39,79	0,14	7,13	52,22	0,70	100,00	
21.Kod.Bogor	93,97	0,28	1,49	4,23	0,03	100,00	
22.Kod.Sukabumi	95,57	0,32	1,00	2,99	0,12	100,00	
23.Kod.Bandung	96,51	0,33	1,12	1,99	0,05	100,00	
24.Kod.Cirebon	86,79	0,30	2,47	10,40	0,04	100,00	
Jawa Barat	1980	13,93	-	12,04	73,06	0,98	100,00
	1990	53,77	0,19	4,44	41,28	0,32	100,00

Sumber: 1. BPS (1983a)  
2. BPS (1992)

Peningkatan program listrik masuk desa dan juga perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat diduga telah memacu peningkatan

pemakaian listrik tersebut. Walaupun kenaikan persentase pemakaian listrik untuk penerangan sangat meningkat, namun jika dilihat cakupannya, hampir setengah dari jumlah rumahtangga di Jawa Barat belum menikmati listrik.

Penggunaan bahan bakar untuk penerangan dan untuk memasak tidak selalu dari jenis bahan bakar yang sama. Dengan demikian, besarnya persentase penggunaan bahan bakar untuk penerangan tidak harus sama dengan persentase yang digunakan untuk memasak. Hanya sekitar 0,93 persen dari jumlah rumahtangga di Jawa Barat pada tahun 1990 yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar untuk memasak. Penggunaan listrik terbanyak untuk memasak terjadi di kota (Tabel 6.3.2).

Tabel 6.3.2: Persentase Rumahtangga Menurut Penggunaan Bahan Bakar  
Untuk Memasak Dan Kabupaten/Kotamadya  
Tahun 1980 dan 1990

Kabupaten/ Kotamadya	Listrik	Gas	Minyak Tanah	Kayu	Arang	Lainya	Jumlah	
01.Kab.Pandeglang	0,28	0,43	10,04	89,10	0,08	0,07	100,00	
02.Kab.Lebak	0,35	0,19	6,99	92,04	0,31	0,06	100,00	
03.Kab.Bogor	1,01	2,41	52,33	43,81	0,03	0,42	100,00	
04.Kab.Sukabumi	0,31	0,32	21,98	77,20	0,11	0,08	100,00	
05.Kab.Cianjur	0,58	0,58	24,42	74,31	0,07	0,04	100,00	
06.Kab.Bandung	1,47	2,06	44,90	51,23	0,07	0,28	100,00	
07.Kab.Garut	0,75	0,45	22,23	75,92	0,05	0,60	100,00	
08.Kab.Tasikmayala	0,55	0,61	21,31	77,37	0,07	0,09	100,00	
09.Kab.Ciamis	0,59	0,42	8,51	90,39	0,06	0,03	100,00	
10.Kab.Kuningan	0,59	0,47	19,95	78,84	0,08	0,07	100,00	
11.Kab.Cirebon	0,83	0,70	41,47	56,66	0,02	0,07	100,00	
12.Kab.Majalengka	0,58	0,53	23,35	75,33	0,02	0,19	100,00	
13.Kab.Sumedang	0,43	0,79	21,76	76,88	0,08	0,04	100,00	
14.Kab.Indramayu	0,38	0,29	27,55	71,45	0,02	0,31	100,00	
15.Kab.Subang	0,50	0,35	27,24	71,46	0,05	0,40	100,00	
16.Kab.Purwakarta	0,93	0,72	25,03	73,09	0,03	0,20	100,00	
17.Kab.Karawang	0,75	1,07	58,07	39,53	0,04	0,53	100,00	
18.Kab.Bekasi	1,58	4,60	31,18	31,18	0,08	0,59	100,00	
19.Kab.Tangerang	1,70	5,10	65,21	27,07	0,08	0,84	100,00	
20.Kab.Serang	0,64	1,17	33,21	64,47	0,06	0,46	100,00	
21.Kod.Bogor	3,30	14,60	78,87	2,59	-	0,63	100,00	
22.Kod.Sukabumi	2,08	6,58	84,89	4,22	0,09	2,15	100,00	
23.Kod.Bandung	2,10	12,59	81,25	2,50	0,03	1,54	100,00	
24.Kod.Cirebon	1,11	12,73	75,06	10,56	0,07	0,46	100,00	
Jawa Barat	1980	0,06	0,31	32,55	66,25	0,04	0,55	100,00
	1990	0,93	2,24	38,43	57,95	0,06	0,39	100,00

Sumber : 1. BPS (1983a)  
2. BPS (1992)

Jenis bahan bakar yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat Jawa Barat sudah mengalami perubahan. Pada tahun 1980 terdapat sekitar 0,06 persen dari rumahtangga di Jawa Barat

menggunakan listrik sebagai bahan bakar untuk memasak. Namun sepuluh tahun kemudian persentase ini meningkat menjadi 0,93 persen. Penggunaan gas sebagai bahan bakar untuk memasak selama kurun waktu 1980-1990 telah menunjukkan peningkatan yang sangat besar, yaitu dari 0,31 persen pada tahun 1980 menjadi 2,24 persen pada tahun 1990; suatu kenaikan di atas tujuh kali lipat. Demikian pula halnya dengan minyak tanah, naik dari 32,55 persen pada tahun 1980 menjadi 38,43 persen pada tahun 1990. Kenaikan-kenaikan persentase dalam penggunaan listrik, gas dan minyak tanah dibarengi dengan penurunan penggunaan bahan bakar tradisional seperti kayu. Penggunaan kayu dalam memasak turun dari 66,25 persen pada tahun 1980 menjadi 57,95 persen pada tahun 1990.

#### 6.4 Sumber Air Minum dan Pembuangan Air

Tersedianya air bersih merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Dalam jumlah penduduk yang banyak seperti halnya di Jawa Barat bisa terjadi ketidak seimbangan antara permintaan dan persediaan akan air bersih. Di satu pihak jumlah penduduk yang besar memerlukan banyaknya kapasitas air bersih, tetapi di lain pihak jumlah penduduk demikian bisa menyebabkan rusaknya konservasi alam, termasuk air bersih.

Tabel 6.4.1: Persentase rumah tangga menurut  
Sumber Air Minum per Kabupaten/Kotamadya  
Tahun 1980 dan 1990

Kabupaten/ Kotamadya	Leding	Pompa Air	Sumur Perigi	Mata Air	Air Sungai	Air Hujan	Lain- nya	Jumlah	
01.Kab.Pandeglang	6,68	3,28	48,12	22,79	7,78	0,52	0,84	100,00	
02.Kab.Lebak	3,07	7,63	39,98	28,89	19,19	0,01	1,25	100,00	
03.Kab.Bogor	6,61	16,13	54,09	21,62	1,21	0,02	0,31	100,00	
04.Kab.Sukabumi	2,82	6,69	45,35	39,81	4,75	0,01	0,57	100,00	
05.Kab.Cianjur	3,59	8,50	47,42	33,60	6,25	0,01	0,63	100,00	
06.Kab.Bandung	5,79	11,94	51,55	29,06	0,98	0,02	0,66	100,00	
07.Kab.Garut	5,02	3,80	42,93	38,82	8,42	0,03	0,98	100,00	
08.Kab.Tasikmayala	3,91	5,88	50,57	35,17	2,23	0,87	0,37	100,00	
09.Kab.Ciamis	3,18	3,55	61,36	30,22	0,95	0,02	0,79	100,00	
10.Kab.Kuningan	5,13	9,28	58,07	27,10	0,18	0,01	0,22	100,00	
11.Kab.Cirebon	9,95	15,20	68,15	4,92	0,81	0,03	0,95	100,00	
12.Kab.Majalengka	3,54	13,50	55,27	26,59	0,94	0,02	0,17	100,00	
13.Kab.Sumedang	4,92	3,26	42,61	46,96	1,92	-	0,32	100,00	
14.Kab.Indramayu	6,84	40,29	40,91	0,99	8,15	1,91	0,91	100,00	
15.Kab.Subang	4,27	34,85	44,40	15,07	0,91	0,07	0,43	100,00	
16.Kab.Purwakarta	8,47	4,15	60,73	25,33	1,25	-	0,06	100,00	
17.Kab.Karawang	4,18	41,12	49,02	1,38	3,44	0,57	0,29	100,00	
18.Kab.Bekasi	5,58	56,08	33,53	0,90	2,51	0,26	0,12	100,00	
19.Kab.Tangerang	7,10	46,50	41,84	0,89	1,88	0,54	1,24	100,00	
20.Kab.Serang	6,95	10,11	53,61	13,80	12,36	2,08	1,09	100,00	
21.Kod.Bogor	55,90	12,25	22,74	8,27	0,37	0,03	0,44	100,00	
22.Kod.Sukabumi	25,43	41,44	30,13	2,19	0,36	0,06	0,39	100,00	
23.Kod.Bandung	34,04	28,88	34,41	1,62	0,03	0,01	1,02	100,00	
24.Kod.Cirebon	78,78	6,37	14,60	0,11	0,05	-	0,08	100,00	
Jawa Barat	1980	3,72	5,52	59,00	23,67	6,18	0,09	1,82	100,00
	1990	7,80	19,41	47,96	20,35	2,92	0,31	0,69	100,00

Sumber : 1. BPS (1983a)  
2. BPS (1992)

Situasi penggunaan sumber air minum di Jawa Barat dalam periode 1980 - 1990 telah mengalami pergeseran. Seperti

ditunjukkan oleh Tabel 6.4.1 bahwa penggunaan sumur perigi telah mengalami penurunan dari 59,00 persen (1980) menjadi 47,96 persen (1990). Sebaliknya, persentase rumahtangga yang memakai air leding telah mengalami peningkatan, yaitu dari 3,72 persen (1980) menjadi 7,80 persen. Peningkatan yang cukup besar terjadi pada penggunaan pompa air, di mana pada tahun 1980 mencapai 5,52 persen, pada tahun 1990 melonjak menjadi 19,41 persen. Selain adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya air minum yang bersih dan sehat, juga hal ini tidak terlepas dari adanya peningkatan pendapatan rumahtangga. Air minum sebagai salah satu unsur dalam kesehatan masyarakat, maka menurunnya penggunaan air minum dari sumber-sumber yang kurang sehat, seperti mata air, air sungai, dan air hujan, merupakan indikator yang baik.

Tempat pembuangan air besar yang sehat merupakan pelengkap daripada fasilitas rumahtangga yang sehat pula. Nampaknya jenis fasilitas ini belum begitu menggembirakan. Keadaan ini diilustrasikan dalam Tabel 6.4.2.

Tabel 6.4.2: Persentase Rumah tangga Menurut  
Tempat Buang Air Besar per Kabupaten/Kotamadya  
Tahun 1980 dan 1990

Kabupaten/ Kotamadya	Kakus Sendiri Dengan Tangki Septik	Kakus Sendiri Tanpa Tangki Septik	Kakus Bersama/ Umum	lainnya	Jumlah	
01.Kab.Pandeglang	7,84	3,67	2,01	68,57	100,00	
02.Kab.Lebak	7,56	4,36	20,58	67,49	100,00	
03.Kab.Bogor	24,63	9,24	30,30	35,83	100,00	
04.Kab.Sukabumi	7,61	5,63	37,13	49,64	100,00	
05.Kab.Cianjur	6,05	9,68	50,36	33,90	100,00	
06.Kab.Bandung	18,95	9,35	50,34	21,36	100,00	
07.Kab.Garut	6,53	9,86	56,18	27,43	100,00	
08.Kab.Tasikmayala	6,79	9,94	46,32	36,95	100,00	
09.Kab.Ciamis	9,73	6,58	28,64	55,05	100,00	
10.Kab.Kuningan	22,25	4,04	28,16	45,55	100,00	
11.Kab.Cirebon	16,79	5,22	20,86	57,13	100,00	
12.Kab.Majalengka	14,61	3,99	25,41	55,99	100,00	
13.Kab.Sumedang	16,21	4,18	42,07	37,54	100,00	
14.Kab.Indramayu	16,48	5,09	16,59	61,84	100,00	
15.Kab.Subang	10,72	5,74	18,70	69,72	100,00	
16.Kab.Purwakarta	18,49	6,59	50,60	24,32	100,00	
17.Kab.Karawang	11,92	3,23	27,86	56,99	100,00	
18.Kab.Bekasi	33,40	7,41	28,24	30,95	100,00	
19.Kab.Tangerang	29,50	8,78	34,75	27,07	100,00	
20.Kab.Serang	41,94	3,18	14,34	67,54	100,00	
21.Kod.Bogor	55,05	10,36	18,69	17,73	100,00	
22.Kod.Sukabumi	28,88	33,78	35,94	1,40	100,00	
23.Kod.Bandung	26,81	39,29	31,49	2,41	100,00	
24.Kod.Cirebon	63,43	9,95	18,83	7,80	100,00	
<hr/>						
Jawa Barat	1980	6,77	7,30	85,93	-	100,00
	1990	17,32	8,77	33,79	40,12	100,00

Sumber : 1. BPS (1983a)  
2. BPS (1992)

Sekitar 17,32 persen dari seluruh rumah tangga di Jawa Barat pada tahun 1990 memiliki kakus sendiri dengan tangki septik, 8,77

persen menggunakan kakus sendiri tapi tanpa tangki septik. Sedangkan yang sudah menggunakan tangki septik tercatat ada 17,32 persen. Lebih dari sepertiganya, rumahtangga di Jawa Barat menggunakan kakus bersama/umum sebagai tempat pembuangan air besar. Namun demikian, perubahan persentase dalam waktu 10 tahun akan lebih berguna. Untuk rumahtangga yang menggunakan kakus sendiri dengan tangki septik telah meningkat hampir tiga kali lipat. Sedangkan penggunaan kakus bersama/umum menurun hampir dua pertiganya bila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1980. Dengan angka-angka ini menunjukkan bahwa pemilikan/penguasaan rumah sehat cenderung membaik.

#### 6.5 Pemilikan Barang Rumahtangga

Pemilikan barang rumahtangga seperti buffet, kompor, sepeda, radio kaset, televisi, motor, dan mobil merupakan pelengkap yang dapat memberikan kenyamanan dan mencirikan status sosial dari penghuninya. Dari data SP'90 terlihat adanya kenaikan persentase rumahtangga yang memiliki barang-barang tersebut. Tercatat ada 8,98 persen dari seluruh rumahtangga yang memiliki sepeda motor dan sekitar 3,41 persen memiliki mobil.

Tabel 6.5.1: Persentase Rumahtangga Menurut Barang  
Rumahtangga yang Dimiliki per Kabupaten/Kotamadya  
Tahun 1980 dan 1990

Kabupaten/ Kotamadya	Buffet	Kompur	Sepeda	Radio Kaset	Televisi	Sepeda Motor	Mobil/ Kapal
01.Kab.Pandeglang	64,31	21,52	15,20	52,78	10,03	5,80	1,73
02.Kab.Lebak	70,06	17,16	11,53	46,73	8,99	4,64	0,81
03.Kab.Bogor	74,11	70,08	19,01	60,49	35,42	8,42	4,87
04.Kab.Sukabumi	72,19	36,01	5,03	46,88	15,16	3,14	1,16
05.Kab.Cianjur	70,17	39,93	5,30	53,31	14,00	3,47	1,35
06.Kab.Bandung	79,90	64,31	12,74	64,74	35,61	8,14	3,88
07.Kab.Garut	75,55	40,15	7,13	61,85	20,97	4,07	1,41
08.Kab.Tasikmayala	77,04	38,26	11,96	58,43	15,34	6,33	1,84
09.Kab.Ciamis	76,64	24,50	25,07	61,00	18,82	7,80	1,57
10.Kab.Kuningan	76,40	39,66	14,15	68,56	26,56	6,95	1,78
11.Kab.Cirebon	68,29	55,94	61,81	62,89	23,33	8,71	1,69
12.Kab.Majalengka	75,50	45,19	36,34	64,69	19,93	6,83	1,69
13.Kab.Sumedang	86,61	44,22	8,88	68,46	26,48	5,32	2,01
14.Kab.Indramayu	62,93	50,23	71,06	56,29	13,40	5,76	1,18
15.Kab.Subang	75,69	44,07	40,99	58,22	16,19	7,47	1,24
16.Kab.Purwakarta	74,15	37,85	12,56	50,30	20,42	5,28	20,04
17.Kab.Karawang	70,36	74,71	54,59	61,74	20,09	9,33	2,54
18.Kab.Bekasi	69,70	80,96	47,06	69,17	41,62	11,43	6,49
19.Kab.Tangerang	74,76	85,51	48,56	69,93	42,38	16,38	6,86
20.Kab.Serang	67,38	49,94	34,95	59,76	22,92	10,64	2,37
21.Kod.Bogor	78,17	98,53	17,17	79,22	66,86	10,06	10,96
22.Kod.Sukabumi	84,45	95,70	13,40	71,84	61,50	10,40	6,07
23.Kod.Bandung	81,53	97,52	23,35	76,44	65,36	23,30	12,78
24.Kod.Cirebon	62,37	92,12	44,11	64,66	57,53	21,48	8,52
Jawa Barat							
1980	56,06	47,04	19,36	41,90	-	-	-
1990	73,88	55,89	27,39	61,65	27,78	8,98	3,41

Sumber : 1. BPS (1983a)  
2. BPS (1992)

Dibandingkan dengan data tahun 1980, keadaan pemilikan barang-barang yang dimiliki oleh rumahtangga di Jawa Barat

memperlihatkan kenaikan. Sebagai contoh, pada tahun 1980 bufet hanya dimiliki oleh sekitar 56 persen dari seluruh rumahtangga, maka pada tahun 1990 naik menjadi 73,88 persen. Begitu pula dengan radio kaset, meningkat dari sekitar 42 persen pada tahun 1980 menjadi hampir 62 persen pada tahun 1990. Ini suatu indikator bahwa kelengkapan barang yang ada di rumahtangga cenderung bertambah yang sekaligus juga merefleksikan perbaikan kondisi ekonomi rumahtangga itu sendiri.

## VII. KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKSANAAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka dapat diberikan beberapa kesimpulan dan saran kebijaksanaan yang kiranya dapat bermanfaat bagi para konsumen data khususnya Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat.

### 7.1. Kesimpulan

1. Propinsi Jawa Barat memiliki laju pertumbuhan penduduk terbesar di Indonesia. Tingginya laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi terutama oleh meningkatnya jumlah penduduk di kawasan Botabek (Kabupaten/Kotamadya Bogor, Tangerang dan Bekasi).
2. Komponen-komponen kependudukan belum sepenuhnya menunjang pengendalian jumlah penduduk di Jawa Barat. Angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian anak relatif masih tinggi. Demikian pula dengan besarnya migrasi masuk yang tidak seimbang.
3. Walaupun jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, namun proporsi penduduk yang bekerja di sektor ini cenderung semakin

menurun. Penurunan ini diimbangi oleh peningkatan proporsi di sektor industri pengolahan.

4. Aspek lain dari tenaga kerja di Jawa Barat yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan pekerja.
5. Dalam bidang pendidikan, selain masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan juga angka buta huruf masih relatif tinggi.
6. Dalam hal struktur umur, penduduk Jawa Barat masih tergolong kepada penduduk umur muda. Hal ini akan berpengaruh pada angka beban ketergantungan penduduk.
7. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada di atas laju pertumbuhan nasional. Demikian pula dengan pendapatan per kapita.
8. Secara fisik, kualitas sumberdaya manusia di Jawa Barat masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini diukur oleh Indek Mutu Hidup.

9. Terdapat peningkatan dalam hal fasilitas rumahtangga, seperti pemilikan televisi, sepeda motor, mobil, dan pemakaian listrik.
10. Kondisi lingkungan rumahtangga yang sehat, seperti sumber air minum, sumber pembuangan air besar, dan tempat pembuangan sampah masih perlu ditingkatkan.

## 7.2. Saran Kebijaksanaan

1. Sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia di Jawa Barat penundaan usia perkawinan pertama merupakan faktor yang harus mendapatkan perhatian.
2. Penanggulangan perpindahan penduduk (migrasi) ke wilayah Botabek sebagai daerah yang mempunyai intensitas pengembangan sektor industri yang cukup tinggi, dengan memberikan peluang pengembangan sentral industri di daerah-daerah lain yang dipandang masih memungkinkan disamping daerah yang telah disebutkan tadi.
3. Peningkatan dari para pelaksana registrasi penduduk baik secara kuantitas maupun kualitas untuk setiap jenjang administrasi.
4. Peningkatan pelaksanaan program Transmigrasi, terutama yang menyangkut transmigrasi Swakarsa.
5. Adanya sistem magang kerja di perusahaan-perusahaan industri sebagai upaya diadakan peningkatan keterampilan penduduk sebelum memasuki peluang bekerja terutama yang berasal dari

tenaga kerja lokal, agar perusahaan industri yang berdomisili di wilayah Jawa Barat tidak perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar Jawa Barat.

6. Mempertahankan dan meningkatkan program imunisasi dan program pemeriksaan ibu hamil dalam upaya menurunkan angka kematian bayi, menaikkan angka harapan hidup dengan lebih meratakan pelayanan kesehatan dengan cara lebih mengfungsikan Puskesmas-puskesmas.
7. Peningkatan program perbaikan kampung, pengembangan kawasan terpadu, program pembangunan prasarana kota terpadu, peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemugaran perumahan dan lingkungan desa secara terpadu dan pembangunan rumah percontohan dengan mengutamakan pada daerah kumuh dan kritis.
8. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, SLTP dan SLTA.
9. Peningkatan Listrik Masuk Desa yang masih perlu diupayakan bagi desa-desa yang belum ada listriknya.

10. Membangun prasarana air bersih, terutama untuk daerah pedesaan dan daerah perkotaan yang lingkungannya dianggap kumuh.

## DAFTAR PUSTAKA

ANANTA, Aris

- 1985 *Mutu Modal Manusia, Suatu Analisis Pendahuluan.*  
Jakarta: LDFEUI dan BPS

BIRO PUSAT STATISTIK (BPS)

- 1974 *Penduduk Jawa Barat.* Sensus Penduduk 1971. Jakarta
- 1983a *Penduduk Jawa Barat: Serie S Nomor 12.* Hasil Sensus Penduduk 1980. Jakarta
- 1983b *Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 1981.* Jakarta
- 1987 *Migrasi Penduduk di Indonesia.* Hasil Survei Penduduk Antar Sensus Tahun 1985. Jakarta
- 1990 *Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 1989.* Jakarta
- 1991a *Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 1990.* Jakarta
- 1991b *Penduduk Indonesia.* Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990. Jakarta
- 1992 *Penduduk Jawa Barat: Serie S Nomor 2.10.* Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990. Jakarta.
- 1993 *Profil Kependudukan Propinsi Jawa Barat 1990*  
(draft): Jakarta

DALDJOENI, N

- 1986 *Masalah Penduduk Dalam Fakta dan Angka.* Bandung:  
Alumni

DAROESMAN, Ruth

- 1972 *An Economic Survey of West Java.* Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol. 8 No. 2

DEPNAKER, DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DAN BPS

- 1982 *Laporan Penelitian Pengukuran Tingkat Pengangguran dan Setengah Pengangguran.* Jakarta

## HOLIDIN, DA

- 1993 *Analisis Demografi dalam Penurunan TFR guna Menunjang Keluarga Sejahtera dan Mandiri*. Makalah disajikan dalam Seminar-Lokakarya sehari dalam Pembentukan PIKSA (Pusat Informasi Kependudukan dan Keluarga Sejahtera) di Bandung, Kerjasama Mingguan MITRA dan BKKBN Propinsi Jawa Barat, 10 Mei 1993

## KANTOR STATISTIK PROPINSI JAWA BARAT

- 1985 *Jawa Barat Dalam Angka 1984*. Bandung
- 1988 *Jawa Barat Dalam Angka 1987*. Bandung
- 1991a *Jawa Barat Dalam Angka 1990*. Bandung
- 1991b *Registrasi Penduduk Tahun 1990*. Bandung

## KANTOR STATISTIK PRPINSI JAWA BARAT DAN BAPPEDA TK. I JAWA BARAT

- 1985 *Penelitian Migrasi di Jawa Barat*. Bandung
- 1992a *Analisa Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Pendapatan dan Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 1990*. Bandung
- 1992b *Indeks Mutu Hidup Jawa Barat Tahun 1990*. Bandung

## KUZNETS, Simon

- 1966 *Modern Economic Growth*. New Heaven. Yale: University Press

## PELZER, Karl

- 1945 *Pioneer Settlements in the Asiatic Tropic*. New York: American Geographical Society

## SHRYOCK, Henry S. and Jacob S. SIEGEL

- 1980 *The Method and Materials of Demography*. Bureau of the Census: Washington

## UNITED NATIONS

- 1983 *Manual X: Indirect Techniques for Demographic Estimation*. Population Studies, No. 81 ST/ESA/SER.A/81. New York

ZNANICKI, Florian  
1963 *Cultural Sciences*, University of Illinois Press:  
Urbana

<https://jabar.bps.go.id>

4552.

<https://jabar.bps.go.id>

~~9232~~

	<b>BADAN PUSAT STATISTIK</b> 054010200018597000KD.1993
6010102999 Serial Lainnya	4552 
Merk Analisa Sensus Penduduk Jawa Barat Tahun 1990	